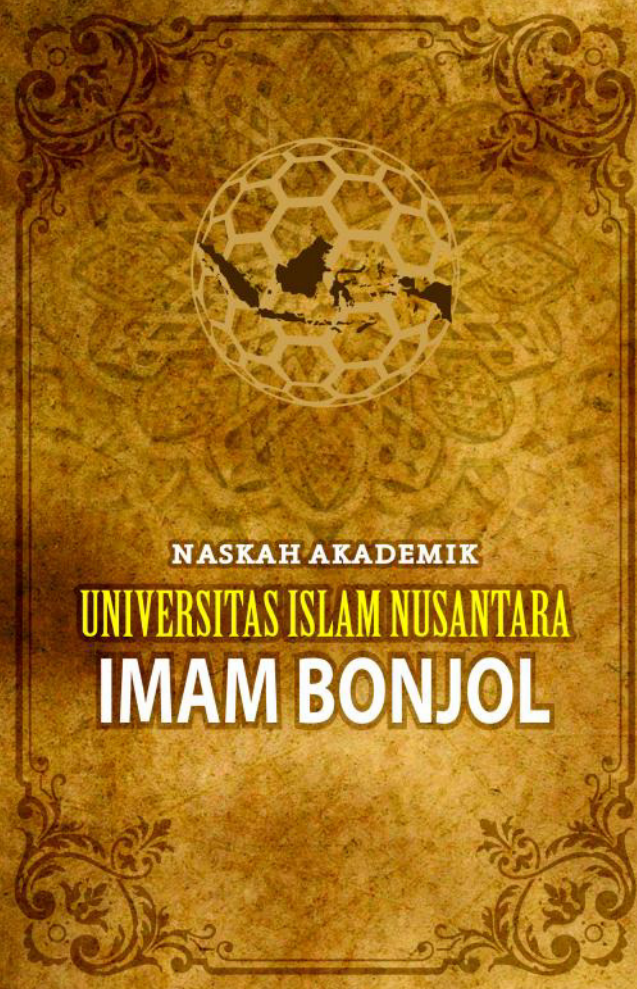




Alamat:
Imam Bonjol Press
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah
Sumatera Barat - Kode Pos - 25153
Telp (0751) 24435-35711, Fax. (075) 20923
Email: ib_press@yahoo.co.id



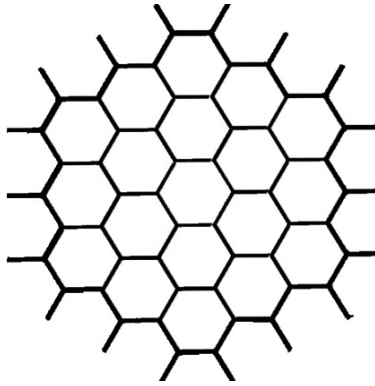
NASKAH AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL



NASKAH AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
IMAM BONJOL

**NASKAH AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
IMAM BONJOL**

**KEILMUAN ISLAM NUSANTARA
BERIMBANG BERDAULAT**



**BERIMAN BERBUDAYA BERILMU
BERMARTABAT BERJATIDIRI BERMORAL**

**IMAM BONJOL PRESS
2014**

Naskah Akademik Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol

Tim Penulis
Nurus Shalihin
Ridwan Muzir
Zulfis

Editor
Lia

Desain Isi
Lelo Legowo

Desain Sampul
Kaoem Koesam Syndicate (KKs)

Hak pengarang dilindungi undang-undang
All right reserved

Cetakan I, November 2014

Diterbitkan oleh
Imam Bonjol Press
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat
Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923
Email : ib_press@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Nurus Shalihin, Sarwan, Zulfis, Reza Fahmi,
Ridwan Muzir, Benny, Nuzul Iskandar, Yasrul Huda,**

*Naskah Akademik Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol/ Nurus
Shalihin, Sarwan, Zulfis, Reza Fahmi, Ridwan Muzir, Benny, Nuzul
Iskandar, Yasrul Huda, Abrar;*

Padang: Imam Bonjol Press, 2014.
vi + 102 hlm.; 15 x 23 cm.
ISBN 978-979-1389-70-9

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved

An-Nahl

Dan Tuhan telah mewahyukan kepada lebah;
Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit; di pohon-pohon kayu;
dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.

Kemudian makanlah dari macam buah-buahan;
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu.

Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya;
di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian terdapat kebesaran Tuhan bagi orang-orang
yang memikirkan

[QS,16:68-69]

Daftar Isi

An-Nahl	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Visi Dan Misi	12
1.4. Tujuan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol	13
1.5. <i>University Value</i> Unversitas Islam Nusantara Imam Bonjol	13
BAB II Paradigma Keilmuan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol	15
2.1. Konstelasi Paradigma Keilmuan Universitas Islam Negeri	15
2.2. Landasan Kontekstual Trasformasi IAIN Imam Bonjol Menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol	18
2.3. Landasan Filosofis Trasformasi IAIN Imam Bonjol Menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol.....	26

2.4. Landasan Filosofis Paradigma Keilmuan Islam Nusantra Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol.....	36
2.5. Landasan Pengembangan Kurikulum Keilmuan Islam Nusantara Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol	50
2.6. Landasan Pengembangan Program Unggulan...	57
2.7. Rancangan Program Studi Ilmu Umum.....	84
2.8. Hubungan Interaktif-Dialektis Keilmuan Agama dan Keilmuan Umum	91
2.9. Rancangan Fakultas Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol	93
BAB III Penutup.....	97
Daftar Pustaka.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

Siapakah kita yang tertegun di antara; kebanggaan masa lalu dan keragu-raguan hari ini;
akankah kita tinggalkan abad ini tanpa suatu titipan
Oleh karena sekali air besar, sakali pula tapian barubah; Sekali tahun baganti, sakali pula musim bertukar
Maka, berkembanglah dan lakukanlah perubahan, tapi jangan terputus dari landasan awal...

1.1. LATAR BELAKANG

IAIN Imam Bonjol Padang telah berkiprah selama beberapa dasawarsa dalam menjalankan Tri Dharma sebagai perguruan tinggi agama Islam. Ia telah membekali mahasiswanya dengan keilmuan Islam, melayani kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan keagamaan, dan turut mengabdikan dengan semangat kebangsaan. Tak heran jika masyarakat memandang IAIN sebagai tempat menimba pengetahuan agama Islam. Ia dipandang sebagai salah satu tempat di mana masalah-masalah keagamaan diteliti dan dicari solusinya.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi berbentuk institut yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, IAIN Imam Bonjol bukanlah lembaga pendidikan keagamaan untuk mencetak ulama: IAIN bukanlah semacam seminari dalam tradisi Kristiani yang akan mencetak calon pastor. (Azra, 2011). Menurut Azyumardi Azra, “sebagai sebuah institut yang liberal,” tak heran jika lulusan IAIN bisa bekerja selain sebagai guru agama Islam di berbagai sekolah dan madrasah, mereka juga bisa jadi aktivis LSM maupun intelektual publik, bahkan tokoh politik. Arti penting dari kenyataan ini dapat dilihat dari pendapat Azra berikut ini:

[...] there is little doubt that the IAIN has played a crucial role in the modernization of Indonesian Muslim society. First of all, IAIN has made it possible for the children of santri (practising Muslim) families to obtain 'modern' Islamic higher education that allows them to achieve not only educational mobility but also social and economic mobility. IAIN, no doubt, has contributed significantly to the so-called 'intellectual boom' that has been taking place in Indonesia since the late 1970s. Furthermore, one can not ignore the role of IAIN graduates in the modernization of Islamic educational institutions, such as madrasahs, pesantrens, and sekolah Islam (Islamic schools), as well as in the development of other Islamic institutions such as Islamic courts, Islamic banking and others. (Azra, 2011). [...tak diragukan lagi bahwa IAIN telah berperan penting dalam memodernisasi masyarakat muslim Indonesia. Pertama-tama, IAIN memungkinkan anak-anak dari keluarga santri memperoleh pendidikan tinggi Islam "modern" yang tidak hanya memberikan peluang mobilitas pendidikan tapi juga mobilitas sosial-ekonomi. Tak pelak lagi IAIN juga berperan penting pada apa yang disebut "booming intelektual" yang sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1970-an. Selain itu, kita juga tidak bisa mengabaikan peran lulusan IAIN dalam memodernisasi lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren dan sekolah Islam, serta dalam mengembangkan lembaga-lembaga Islam lain seperti Pengadilan Agama, perbankan Islam, dan lain-lain.

Dari perjalanan dan peran yang telah dimainkannya ini muncul pertanyaan; Apakah IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam hanya akan menjawab persoalan keagamaan saja, padahal persoalan di tengah masyarakat tidak hanya itu? Apa jawaban yang akan diberikan IAIN jika masyarakat mengajukan masalah yang tidak bersifat keagamaan, atau tidak terkait langsung dengannya? Apakah dia bisa mengelak dengan dalih masalah itu bukan bagiannya, melainkan jatah perguruan tinggi umum? Apakah civitas akademiknya bukan bagian masyarakat yang mengajukan masalah itu? Mengapa citra yang melekat pada IAIN seperti ini dan apakah citra itu masih bisa dipertahankan?

Pertanyaan-pertanyaan ini dimunculkan baik oleh civitas akademika IAIN sendiri maupun masyarakat Sumatera Barat secara umum tempat IAIN Imam Bonjol berada. Pertanyaan-pertanyaan

itu lahir dari sebuah kegelisahan untuk menuntut apa yang disebut Azyumardi Azra (2011) sebagai “mandate akademis” yang lebih besar melebihi apa yang telah diamanatkan konstitusi dan undang-undang yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa tuntutan tersebut lahir. *Pertama*, dikotomi pengetahuan antara pengetahuan agama Islam dan pengetahuan umum yang selama ini jadi dasar adanya dua institusi pendidikan milik negara yang jadi pilihan bagi umat Muslim di Indonesia, perguruan tinggi agama Islam atau perguruan tinggi umum, madrasah atau sekolah. Terlepas dari debat epistemologis yang melatarinya, dikotomi ini senyatanya sudah tidak bisa terus dipertahankan lagi karena lebih besar mudharatnya bagi umat Islam ketimbang manfaatnya. *Kedua*, pembangunan bangsa dan negara kian hari kian memerlukan peran umat Muslim –yang notabene merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Jika peran ini ingin ditunaikan umat Muslim, maka tak pelak lagi salah satu unsur yang perlu dipersiapkan adalah institusi yang menunjang peran itu. *Ketiga*, perubahan madrasah-madrasah menjadi sekolah umum maupun makin besarnya porsi kurikulum umum di pondok-pondok pesantren menyebabkan peserta didik yang memilih jurusan umum (IPA, IPS atau Bahasa) tidak bisa melanjutkan pendidikan tingginya ke IAIN karena IAIN belum atau bahkan sama sekali tidak menyediakan program-program studi yang sesuai dengan jurusan mereka di sekolah menengah.

Alasan-alasan yang diamati oleh Azra di tingkat nasional di atas menemukan wujud faktualnya di tengah kondisi sosial-budaya masyarakat muslim Sumatera Barat, yang mayoritas beretnis Minangkabau. *Pertama*, di ranah sosial ekonomi, kebutuhan mendesak yang harus diakui oleh institusi IAIN adalah masalah lapangan pekerjaan. Di dunia ekonomi yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) seperti sekarang, pekerjaan profesional

mensyaratkan penguasaan ilmu dan keterampilan khusus yang tak dapat diperoleh hanya melalui magang atau belajar sambil bekerja. Ekonomi seperti ini mengharuskan orang belajar dulu sebelum bekerja. Ini terasa sekali di pekerjaan-pekerjaan sektor jasa. Tidak mungkin seseorang belajar sendiri pengembangan konten dan perangkat lunak komputer tanpa terlebih dahulu belajar dasar-dasar ilmu komputer, pemrograman, pengolahan data, desain web. Lulusan IAIN yang ingin terjun ke dunia usaha atau dunia profesional harus belajar otodidak mendapatkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk usaha atau pekerjaan yang akan diterjuninya. Dia tidak bisa mengandalkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh di jurusan bahasa Arab, Hukum Islam, atau dakwah, misalnya.

Kedua, di level dunia pendidikan menengah terjadi kegamangan peserta didik. Di satu sisi, sebagian besar keluarga dan masyarakat masih membayangkan bahwa IAIN Imam Bonjol adalah perguruan tinggi ideal untuk menimba pengetahuan sembari memperkuat komitmen moral dan iman. Karena itu orang tua lulusan madrasah aliyah mendorong anaknya kuliah di IAIN Imam Bonjol. Sementara di sisi lain, madrasah aliyah sudah mulai mengintegrasikan kurikulum agama dan kurikulum umum, di mana *core* pendidikannya adalah nilai-nilai keagamaan sementara materi yang diajarkan lebih banyak materi pelajaran umum. Ketika lulusan ini belajar di IAIN Imam Bonjol yang nota bene masih berkutat dalam perkuliahan ilmu-ilmu agama, mereka kesulitan sebab tidak memiliki dasar yang kuat selama di madrasah aliyah.

Ketiga, dan yang paling terasa di tengah masyarakat, adalah kenyataan sosial-budaya masyarakat Minangkabau yang memosisikan lulusan IAIN Imam Bonjol sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika lulusan IAIN Imam Bonjol kembali ke

tengah masyarakat, mereka disodori oleh urusan-urusan yang tidak hanya berkaitan dengan soal keagamaan, seperti soal administrasi kampung, pengelolaan masjid, pendidikan TPA, pengelolaan bantuan pemerintah/swasta untuk masyarakat, penyelesaian konflik, dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan lain. Posisi terhormat ini tentu memerlukan ilmu dan keterampilan khusus yang tak bisa hanya diperoleh lewat perkuliahan-perkuliahan ilmu agama. Di antara ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan itu adalah kemampuan manajemen organisasi, manajemen konflik, pengetahuan ekonomi, pengetahuan politik, pengetahuan budaya dan lain sebagainya. Selama ini mahasiswa IAIN Imam Bonjol memperoleh ilmu dan keterampilan di bidang-bidang ini justru di luar perkuliahan secara otodidak.

Dari kondisi-kondisi riil di tengah masyarakat ini terlihat betapa mendesaknya IAIN Imam Bonjol mengubah paradigma kegiatan keilmuannya sebagai sebuah institut dengan mandate akademik yang terbatas menjadi universitas dengan mandate yang lebih luas. Perluasan mandate ini akan menjawab kebutuhan-kebutuhan di tengah masyarakat tadi sebab pada intinya yang diperlukan masyarakat adalah sosok-sosok lulusan yang berilmu sekaligus cakap sehingga bisa mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Maka peralihan status IAIN Imam Bonjol Padang menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol Padang menjadi penting untuk segera diwujudkan. Ada tiga alasan mengapa peralihan itu begitu mendesak: *Pertama*, pentingnya transformasi ilmu keislaman dan ilmu umum sebagai bentuk pengembangan ilmu secara komprehensif. Sehingga proses transformasi ilmu pengetahuan di IAIN Imam Bonjol yang akan menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memberikan pengayaan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya menguntungkan dan memberi peluang

besar bagi kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang berfilosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kedua, pentingnya IAIN Imam Bonjol berafiliasi dengan lembaga pengelolaan pendidikan, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Sehingga perubahan IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Imam Bonjol memberikan peluang lembaga PTAIN di Sumatera Barat ini untuk lebih mampu bersaing dengan PTU (Perguruan Tinggi Umum) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, adanya tuntutan kultural pengimplementasian dan pengejawantahan *Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah* melalui transformasi Islam, Ilmu dan Adat/Budaya Minangkabau sebagai satu kesatuan yang utuh dan terinternalisasi dalam setiap generasi muda yang menimba ilmu di PTAIN yang mengalami perubahan dari IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol.

Uraian di atas seakan membuktikan perkiraan Azyumardi Azra satu dasawarsa lalu perihal perkembangan kajian Islam (*Islamic studies*) dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Dia memperkirakan, bahkan cenderung memastikan, bahwa di masa yang akan datang, kajian Islam di Indonesia akan memiliki empat kecenderungan: *pertama*, kajian keislaman kian lama kian terintegrasi dengan kajian keilmuan lain; *kedua*, akan terbentuk kajian keislaman baru yang menerapkan pendekatan dan analisis yang lebih menekankan aspek sosial-historis; *ketiga*, kajian keislaman Indonesia akan dan harus mempertimbangkan konteks lokal—yakni budaya dan pengetahuan lokal—dengan cara yang lebih khas; dan *keempat*, kajian itu akan menerapkan analisis komparatif tentang Islam di tingkat lokal untuk mengenali kekhasannya masing-masing.

Konsekuensi logis dari kecenderungan masa depan ini adalah kajian keislaman di suatu lokalitas tertentu, dalam hal ini, Universitas

Islam Nusantara Imam Bonjol mengkaji Islam sebagaimana yang ada di tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, mau tak mau juga akan mempertimbangkan kajian Islam di lokalitas-lokalitas tempat lain. Itulah mengapa IAIN Imam Bonjol menggagas peralihan status menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol yang akan mengusung paradigma kajian Islam bernama *Islam Nusantara*.

Maka untuk kepentingan peralihan status IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Imam Bonjol sebagaimana yang diungkapkan di atas, proposal alih status ini akan memaparkan secara lebih terperinci hal-hal berikut:

Di Bab I ini diuraikan latar belakang sosial-historis dan budaya peralihan status IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol. Karena merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah negara, disampaikan juga landasan konstitusional peralihan ini.

Bab II akan menguraikan secara khusus paradigma keilmuan yang akan dikembangkan oleh Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol. Di sini yang akan dibahas adalah persoalan-persoalan filosofis yang akan jadi dasar pengembangan keilmuan.

Selanjutnya Bab III akan menguraikan profil kelembagaan IAIN Imam Bonjol yang ada saat ini. Di sini akan dipaparkan sekelumit sejarahnya, data-data akademik yang dimiliki serta profil sarana dan prasarana yang tersedia saat ini.

Bab IV akan mengetengahkan analisis dan rencana pengembangan, kekuatan, kelemahan, serta peluang apa yang dimiliki. Analisis ini kemudian dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan strategi yang akan ditempuh sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bab V akan memfokuskan diri pada ruang lingkup sasaran dan tujuan yang akan dicapai dengan menguraikan secara detail pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan di

wilayah kegiatan akademik (*academic enterprise*) serta segenap hal penunjangnya. Fokus pengembangan tentu saja diarahkan pada paradigma integratif antara ilmu dan Islam yang jadi inti *academic enterprise* tersebut.

Proposal ini akan di tutup dengan Bab V yang akan berisi simpulan-simpulan penting terkait landasan, filosofis, peluang dan tantangan, strategi, serta tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam peralihan status IAIN Imam Bonjol jadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol ini.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana perubahan IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol mendapat legitimasi dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah;

1.2.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Keempat bangsa Indonesia secara tegas menjelaskan rumusan cita-cita nasional di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa Alih Status Kelembagaan IAIN menjadi Universitas merupakan salah satu perwujudan hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sampai ke Perguruan Tinggi.

Mengacu pada Pasal 31 ayat (3), dan (5) UUD 1945, dimana, *pertama*, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sitem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (ayat, 3), *kedua*, pemerintah memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia (ayat 5), maka UIN sebagai Pendidikan Tinggi berbasis keagamaan menempati posisi penting dan sangat strategis dalam mewujudkan amanat UUD 1945.

1.2.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 secara tegas bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangs. Selanjutnya, pasal ini juga menetapkan tujuan pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Terkait dengan kelembagaan UIN sebagai Perguruan Tinggi keagamaan, penjelasan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

1.2.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

Pasal 10 ayat (2) memasukkan ilmu agama yang menjadi *core* keilmuan UIN sebagai salah satu dari enam rumpun keilmuan (ilmu

agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal dan ilmu terapan). Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. Pendidikan keagamaan yang dimaksud dijelaskan dalam ayat (2) bahwa pendidikan keagamaan berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk ma'had 'ali, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis.

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No.12 Tahun 2012 menjelaskan perbedaan antar lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi. Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi-vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Mandat ini lebih luas dari pada institut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) yang hanya bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Selain dasar hukum utama di atas, ada beberapa instrumen peraturan perundang-undangan terkait pendidikan atau Perguruan Tinggi yang dijadikan acuan alih status IAIN menjadi UIN:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Imam Bonjol Padang;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar;

14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/Dikti/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan; Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
15. Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/Dikti/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi dan Penataan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Republik Indonesia Nomor Dj.I/441/2010 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
17. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3389 Tahun 2013 Tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

1.3. VISI DAN MISI

1.3.1. Visi:

Menjadi Universitas Islam Nusantara

1.3.2. Misi:

- Menyelenggarakan Pendidikan yang Memanusiakan Peserta Didik untuk Mengembangkan Potensinya sebagai Khalifah di Bumi;

- Menggalakkan Riset yang Kompetitif dan Lintas Disipliner/ Multi Disipliner;
- Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Semangat Emansipatoris.

1.4. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Berbudaya; Berilmu dan Bermartabat; Berjati diri dan Bermoral.

1.5. *UNIVERSITY VALUE* UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

- Berimbang dan Berdaulat;
- Beriman dan Berbudaya, Berilmu dan Bermartabat, Berjati diri dan Bermoral.

BAB II

PARADIGMA KEILMUAN

UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

IMAM BONJOL

Dan Tuhan telah mewahyukan kepada lebah;
Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit; di pohon-pohon kayu; dan di tempat-
tempat yang dibuat manusia.
Kemudian makanlah dari macam buah-buahan; dan tempuhlah jalan Tuhanmu
yang telah dimudahkan bagimu.
Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya;
di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian terdapat kebesaran Tuhan bagi orang-orang
yang memikirkannya
An Nahl [QS,16:68-69]

2.1. KONSTELASI PARADIGMA KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Berawal dari keinginan lembaga pendidikan tinggi Islam memperoleh mandat keilmuan yang lebih besar yang diakui negara berdasarkan konstitusi, maka di penghujung tahun 1990-an mulailah wacana untuk mengubah status IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perolehan mandat yang lebih besar itu. Sejak digulirkannya wacana itu dan diikuti dengan langkah-langkah konkret seperti penggodokan basis epistemologis bagi perubahan status dari institut ke universitas, persiapan sumber daya manusia untuk tenaga pengajar dan administrasi, persiapan infrastruktur penunjang seperti gedung dan jaringan, dan lain sebagainya, maka hasil dari keinginan itu telah dapat dilihat dari beberapa UIN yang telah didirikan dalam kurun satu setengah dasawarsa ini.

Sejak tahun 2002, pemerintah telah mentransformasi IAIN/STAIN menjadi Universitas sebanyak 8 PTAIN yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), UIN Sunan Kalijaga (2004), UIN Malang (2004), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2005), UIN Sunan Syarif Qasim Pekanbaru, UIN Sunan Ampel Surabaya (2013), dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2013).

Transformasi IAIN menjadi UIN pada dasarnya tidak hanya transformasi kelembagaan tapi lebih jauh dari itu transformasi epistemologi sebagai dasar dan nilai pengembangan keilmuan. Masing-masing UIN memiliki landasan filosofis yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan meskipun manifestasi dan simbol yang digunakan berbeda-beda.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki visi “Berdaya saing tinggi dan terdepan dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keilmuan, keislaman dan keindonesiaan,” dengan moto *knowledge, piety, dan integrity*. Paradigma keilmuan yang dibangun adalah integrasi ilmu agama dan ilmu umum.

Sementara itu, UIN Sunan Kalijaga mengusung visi “Unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi peradaban”. Visi tersebut dikembangkan dengan nilai **Integratif-Interkonektif**: Sistem keterpaduan dalam pengembangan akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerjasama, dan entrepreneurship. (www.uinsuka.ac.id).

Imam Suprayogo sebagai penggagas berdirinya UIN Malang menjadikan paradigma “pohon ilmu” sebagai metafora universitas. Ilmu-ilmu alat (bahasa, filsafat, ilmu alam, ilmu sosial, dan Pancasila) digambar sebagai akar dan harus dikuasai. Ilmu yang bersumber dari wahyu, sunnah, pemikiran Islam, dan masyarakat Islam diibaratkan seperti batang. Sementara ilmu-ilmu lain merupakan dahan, ranting, dan daun dari pohon ilmu (Suprayogo, 2008).

Roda menjadi inspirasi bagi pengembangan model paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari filosofi roda tersebut, UIN Sunan Djati Bandung merumuskan visi yaitu “Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif” dengan menggunakan Ilustrasi filosofi RODA. Roda ini menandakan adanya titik-titik persentuhan, antara ilmu dan agama. Artinya, pada titik-titik persentuhan itu, kita dapat membangun juga kemungkinan melakukan integrasi keduanya. (<http://www.uinsgd.ac.id>).

UIN Makasar mempunyai visi “Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam” dengan misi menciptakan atmosfir akademik yang representatif bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks). (<http://uin-alauddin.ac.id/>).

Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral di kawasan Asia Tenggara.” Karakteristiknya adalah pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid (*belief affection*), pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religious sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan, penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, muamalah dan akhlak (<http://www.uin-suska.ac.id/>). Karakteristik di atas menunjukkan bahwa paradigma keilmuan tetap dalam kerangka integrasi.

2.2. LANDASAN KONTEKSTUAL TRASFORMASI IAIN IMAM BONJOL MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

Konteks paling dasar dari perubahan IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah hikmah kebudayaan lokal masyarakat Minangkabau tempat IAIN Imam Bonjol berada. Terkait dengan IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam, salah satu inti kebudayaan Minangkabau yang paling relevan dengannya tercermin dalam ungkapan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, suatu ungkapan yang menegaskan bahwa adat kebiasaan masyarakat Minangkabau selalu terpulang pada syariat, dan syariat itu mau tidak mau selalu berhulu pada Kitab Allah.

Sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini, perubahan-perubahan yang dialami masyarakat Minangkabau khususnya, dan Sumatera Barat pada umumnya, mengharuskan civitas akademika IAIN Imam Bonjol serta cendekiawan muslim umumnya untuk memiliki sikap kritis. Sikap kritis ini diperlukan untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi agar inti kebudayaan yang terkandung dalam ungkapan *Adat Basandi Syara'; Syara' Basandi Kitabullah* tadi tidak hanya tinggal sebagai slogan yang diulang-ulang, namun tidak pernah terwujud dalam realitas nyata kebudayaan itu sendiri. Peralihan status IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah usaha untuk memperoleh sikap kritis itu supaya ungkapan yang jadi inti kebudayaan Minangkabau tersebut tetap relevan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

IAIN Imam Bonjol sudah berusia hampir lima dasawarsa. Dia telah menjadi saksi perubahan sosial budaya tidak hanya bagi masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau tapi juga Indonesia dalam rentang waktu setengah abad. Di awal berdirinya, IAIN Imam Bonjol

menjadi saksi sekaligus ajang penggodokan arus utama pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang waktu itu. Perannya adalah sebagai lembaga pendidikan lanjutan untuk mendalami aspek-aspek normatif dari kajian Islam (*Islamic Studies*). Peran ini disamping untuk memenuhi kebutuhan rekrutmen pegawai pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, pada dasarnya adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan perguruan-perguruan tinggi Islam di dalam negeri yang bisa menggantikan peran yang dimainkan perguruan-perguruan tinggi Islam di Timur Tengah, terutama Al-Azhar Mesir, yang selama akhir abad 19 dan awal ke 20, menjadi tempat belajar mahasiswa dari Nusantara dan telah menghasilkan pemikir-pemikir Islam Indonesia.

Pada periode selanjutnya IAIN memenuhi peran sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang bisa menunjang pembangunan nasional yang digalakkan pemerintahan Orde Baru. Pada intinya IAIN Imam Bonjol berfungsi sebagai tempat orang mempelajari agama Islam dengan segenap persoalannya, baik dari segi normatif, maupun sosial-politik, dalam rangka menghasilkan *stock of knowledge* yang bisa mendukung pembangunan nasional. Salah satu capaian paling penting di bidang kajian keagamaan Islam dalam konteks pembangunan nasional ini adalah bagaimana IAIN bisa menerjemahkan pemikiran H. Mukti Ali tentang kerukunan umat beragama menjadi sebuah jurusan.

Jika pada masa-masa sebelumnya hubungan antar agama dipahami oleh umat Islam secara normatif, namun dengan adanya pengarusutamaan isu hubungan antar beragama sebagaimana yang dibahas di perkuliahan di IAIN, isu ini bisa digiring menjadi hubungan dialogis antar agama. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional yang menjadi syarat dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang dicanangkan Orde Baru.

Agar dua contoh seiring, mazhab-mazhab pemikiran fiqh yang sebelumnya dipahami secara normatif sehingga tidak jarang menciptakan polemik keras, bahkan konflik di internal umat Islam sendiri, di IAIN dikaji secara komparatif dalam jurusan dan mata kuliah Perbandingan Mazhab dan Hukum. Untuk konteks yang lebih umum dan nasional, geliat pemikiran di bidang perbandingan mazhab dan hukum ini memberikan sumbangan wacana yang tidak sedikit bagi apa yang sekarang dikenal dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sementara untuk konteks yang lebih kecil, di Sumatera Barat sendiri, wacana ini telah membantu meredam dampak negatif dari polemik dan konflik seputar masalah-masalah *khilafiah* di tengah masyarakat.

Di penghujung era 1990-an dan bertepatan dengan berakhirnya masa Orde Baru, kondisi sosial budaya berubah seiring berubahnya kondisi sosial politik. Pada level politik, perubahan sosial budaya terjadi akibat adanya desentralisasi kekuasaan dan demokratisasi, pada level ekonomi perubahan itu terjadi akibat makin nyata dampak era globalisasi, dan pada level budaya perubahan itu terjadi akibat kemajuan revolusioner media informasi dan komunikasi. Perubahan-perubahan kontemporer yang terjadi pada dasawarsa pertama abad 21 ini perlu ditelisik lebih jauh untuk mengetahui secara lebih kurang terperinci konteks dan faktor yang melatari kebutuhan peralihan IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol.

Pertama, Globalisasi. Globalisasi adalah satu di antara istilah yang sulit didefinisikan secara tegas. Satu-satunya pengertian yang menyatukan sekian banyak definisi yang diajukan adalah kesalingterkaitan secara global (berasal dari kata “globe”, bola bumi). Di era globalisasi, suatu peristiwa di satu tempat dipengaruhi dan mempengaruhi peristiwa di tempat lain. Yang jadi kunci di era ini adalah jejaring (*network*) yang mendunia. Mengutip David Held, Morrow dan Torres mengartikan globalisasi sebagai berikut;

[...] *that globalization is the product of the emergence of a global economy, expansion of transnational linkages between economic units creating new forms of collective decision making, development of intergovernmental and quasi-supranational institutions, intensification of transnational communications, and the creation of new regional and military orders* (Raymond A. Morrow dan Carlos Alberto Torres, 2000) [Globalisasi terjadi karena munculnya ekonomi global, meluasnya jaringan unit-unit ekonomi antarbangsa yang menyebabkan terciptanya bentuk-bentuk pengambilan keputusan kolektif baru, pengembangan lembaga-lembaga antarpemerintah dan kuasi-supranasional, makin intensifnya komunikasi transnasional, dan terciptanya tatanan regional dan militer baru].

Pendidikan sebagai pranata penting dalam satu masyarakat juga tak akan kedap dari pengaruh globalisasi yang menggerayangi ranah ekonomi, politik, komunikasi (budaya) dan ketahanan suatu masyarakat. Hal yang paling mencolok dari globalisasi adalah negara memiliki peran dan fungsi yang tak sama lagi dengan era-era sebelumnya dalam mengayomi rakyatnya. *“The process of globalization is seen as blurring national boundaries, shifting solidarities within and between nation-states, and deeply affecting the constituting of national and interest-group identities* (Raymond A. Morrow dan Carlos Alberto Torres, 2000) [Proses globalisasi adalah mengaburnya batas-batas nasional, bergesernya solidaritas di dalam dan antar negara-bangsa, dan benar-benar mempengaruhi pembentukan identitas nasional dan kelompok kepentingan].

Secara tegas dapat dinyatakan bahwa dalam hal pendidikan, globalisasi berpengaruh pada tiga level: level ekonomi; level politik; dan, level kebijakan, praktik dan institusi. Pada level ekonomi, globalisasi mempengaruhi lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, dari segi perannya. Secara tradisional, perannya adalah melahirkan manusia-manusia terdidik sehingga bisa mengamalkan pengetahuan yang diperolehnya di lembaga itu untuk kebaikan bersama. Dengan globalisasi seperti pengertian di atas, peran itu bergeser menjadi mempersiapkan tenaga kerja, sebab percaturan

ekonomi (produksi dan konsumsi) yang saling terkait secara global, memerlukan tenaga-tenaga terampil dan siap pakai untuk produksi sekaligus menghendaki calon-calon konsumen yang juga terampil dalam menggunakan produk-produk baru yang lahir dari industri transnasional.

Pada level politik, negara-bangsa yang menaungi satu lembaga pendidikan terkendala, minimal harus bernegosiasi, dengan lembaga-lembaga transnasional akibat kesepakatan dan kerjasama yang dijalin. Sedangkan pada level kebijakan, praktik, dan institusi perubahan global yang diakibatkan globalisasi mengharuskan dunia pendidikan tinggi beradaptasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Perubahan pada level ekonomi dan politik mau tak mau harus diterjemahkan ke level kebijakan. Sebagai ilustrasi, wacana gender secara politik yang diperjuangkan oleh para aktivis feminis di belahan dunia lain mendapatkan gaungnya di mata kuliah-mata kuliah tertentu atau seminar-seminar bertema pengarusutamaan gender di sini. Geliat perbankan dan keuangan Islam yang berkembang di beberapa negara Islam di Timur Tengah juga mendapatkan gaungnya di tingkat institusi dan kebijakan pendidikan di negara-negara muslim lain, terutama Asia Tenggara.

Masyarakat mana pun, tak terkecuali masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, tempat IAIN Imam Bonjol berada, menghadapi ancaman sebab posisinya yang jadi bagian dari masyarakat dunia ketiga. Namun globalisasi sebagai ancaman juga sekaligus menjadi syarat masyarakat kontemporer untuk bertahan. Di era globalisasi, masyarakat yang mengucilkan dirinya sendiri supaya aman akan lenyap dari sejarah. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan kemudahan/kesempatan dalam kesusahan yang dibawa globalisasi?

Globalisasi tidak bisa dihadapi dengan sikap pesimis maupun asertif, sebab di dalamnya terkandung peluang-peluang yang

memang harus dimanfaatkan secara arif. Di antara ciri inheren dalam globalisasi yang dapat dijadikan peluang adalah dihargainya demokrasi dan pluralisme serta dijunjungtingginya penegakan hukum. Menghadapi peluang-peluang ini, lembaga pendidikan tinggi Islam mau tak mau harus mengajarkan kearifan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih daripada yang selama ini sudah diajarkan. Apa yang selama ini sudah dikembangkan dalam naungan IAIN sebagai sebuah institut harus dikembangkan lebih jauh ke tingkat yang lebih tinggi, yakni universitas, di mana di situ orang (civitas akademiknya) bekerja bahu-membahu dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk “menemukan” kebenaran. Dari sinilah diharapkan lahir komitmen pada kebenaran, kebaikan dan keindahan yang sangat diperlukan untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang dibuka oleh globalisasi.

Dalam konteks globalisasi, civitas akademika IAIN Imam Bonjol menyadari betul bahwa perubahan menjadi sebuah universitas mengandung jebakan yang luar biasa besar, yakni tuntutan spesialisasi disiplin untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Konsekuensi hal ini untuk kehidupan akademis adalah makin tersekatnya antar disiplin pengetahuan. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol harus menghindari jebakan ini dengan merancang kegiatan akademik (rancangan fakultas, jurusan, prodi, pusat studi, dan sebagainya) yang pertama dan utama sekali berkomitmen pada pengetahuan, bukan pada tuntutan pasar tenaga kerja profesional dan spesialis.

Kedua, konteks nasional. Desentralisasi dan demokratisasi membawa masalah-masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sentralisasi yang relatif sudah sangat berkurang sejak era Reformasi mendorong kekuatan-kekuatan di tengah masyarakat berupaya menonjolkan diri. Pihak yang selama ini terpinggirkan mulai bersuara. Proses ini bukannya tidak melahirkan persoalan, sebab

secara vertikal yang jadi taruhan adalah persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa, sementara secara horizontal yang jadi taruhan adalah konflik antar kelompok.

Di era desentralisasi dan demokratisasi politik, makna kebhinekaan bangsa menjadi ambigu, yang jika tidak dikelola secara hati-hati, justru akan menjurus pada disintegrasi. Yang membuatnya ambigu adalah perkembangan teknologi informasi/komunikasi dan transportasi. Di satu sisi, masing-masing kelompok pembentuk kebhinekaan bangsa Indonesia bisa bersuara lewat berbagai media, namun di sisi lain, justru lewat media kadang-kadang konflik dan ancaman disintegrasi itu terasa begitu nyata. Ini terjadi ketika masyarakat terus menerus dihujani dengan informasi tentang konflik horizontal. Salah satu konflik yang sering diberitakan itu adalah yang disinyalir berlatar belakang “keagamaan” atau sektarianisme. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana merawat kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa di abad teknologi?

Pertanyaan ini memerlukan tekad dan perjuangan berat seluruh bangsa Indonesia. IAIN Imam Bonjol juga dapat mengambil peran dalam menjawab pertanyaan ini dengan cara menelaah secara kritis, dan dari situ mengambil sikap yang tepat untuk menjawabnya. Studi Zainal Abidin Bagir dan Irwan Abdullah (2011:57-54) menyimpulkan bahwa dalam konteks keindonesian masa kini dan lebih-lebih masa yang akan datang, kajian agama (*religious studies*) memainkan peran ganda: *pertama*, mendorong terwujudnya apa yang mereka sebut kemelekan agama (*religious literacy*) dalam arti bahwa seseorang memeluk agama dengan taat juga harus melek (tahu) posisi dan tempat agamanya di tengah-tengah kebersamaannya dengan agama-agama lain yang dianut oleh sesama anggota masyarakat. Kemelekan agama ini adalah pintu masuk ke dalam hubungan antar-agama yang harmonis antarpemeluk agama. *Kedua*, kajian agama dapat dan seharusnya memang memberi sumbangan bagi persoalan-

persoalan kontemporer, seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, penindasan politik dan lain sebagainya.

Sebagai perguruan tinggi Islam, IAIN Imam Bonjol yang selama ini mandatnya hanya terbatas untuk mengkaji masalah-masalah keagamaan dari sudut pandang ilmu-ilmu agama Islam sendiri dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan kebangsaan ini dengan satu syarat, yakni melengkapi dirinya dengan khazanah keilmuan yang lebih luas dari sekadar keilmuan agama Islam. Cara yang harus ditempuh IAIN Imam Bonjol tidak bisa dengan hanya mengembangkan diri di dalam satu rumpun keilmuan dalam koridornya sebagai sebuah institut. Sebab disiplin yang harus dikuasai untuk menjawab tantangan persoalan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mungkin hanya dilandaskan pada satu rumpun keilmuan. Kalau pun secara institusional itu mungkin saja dilakukan, namun tuntutan spesialisasi disiplin yang disyaratkan oleh kondisi keilmuan kontemporer tidak memungkinkan seseorang bisa spesialis di beberapa rumpun keilmuan sekaligus. Secara kelembagaan, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan berubah menjadi universitas, sebab di universitaslah beberapa rumpun keilmuan dapat bahu-membahu mencari kebenaran, dan berlandaskan kebenaran yang ditemukan ini persoalan di tengah masyarakat coba diselesaikan.

Ketiga, konteks lokal. Dalam konteks lokal, perubahan sosial-budaya yang diakibatkan oleh globalisasi dan desentralisasi menimbulkan kepanikan moral dan krisis identitas. Melalui teknologi, masyarakat lokal Sumatera Barat terpapar pada berbagai jenis persuasi nilai, paham, pandangan hidup, ideologi, dan lain-lain. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk berpikir ulang tentang, dan karena itu menengguhkan, penilaiannya atas berbagai hal yang terjadi. Dengan basis moral seperti apa akan dinilai mahasiswa yang demo menuntut penguasa, kaum perempuan yang menuntut

pengarusutamaan isu gender, komodifikasi ritual keagamaan, komersialisasi wacana keagamaan,

Sedangkan desentralisasi membuat masing-masing kelompok ingin menyuarakan identitasnya, sementara identitas yang ingin disuarakan itu diadopsi lewat media global. Misalnya, saat ini kelompok-kelompok dalam Islam dengan mudah mempromosikan nilai-nilai yang berbeda dari nilai yang selama ini dianut. Begitu pula dengan wacana akademis dan wacana keilmuan secara umum. Begitu banyak sumber pengetahuan dan informasi dari berbagai penjuru dunia yang bisa diterima dan diakses dengan gampang. Kondisi membuat pluralisme wacana menjadi fakta yang tak terbantahkan. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol di satu sisi harus siap menjadi wadah bagi aneka ragam wacana itu supaya bisa dipelajari, ditelaah dan dikritisi oleh segenap civitas akademiknya. Di sisi lain, pluralisme wacana mau tak mau juga akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol harus menyikapi hal ini bukan dengan cara yang otoriter, dan berpihak pada satu wacana tertentu.

2.3. LANDASAN FILOSOFIS TRASFORMASI IAIN IMAM BONJOL MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

Secara filosofis, transformasi IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dilandaskan pada gagasan pengintegrasian kembali (reintegrasi) ilmu-ilmu keagamaan Islam—yang dalam kosa kata akademis Barat disebut *Islamic religious sciences* atau dalam kosa kata akademis Arab-Islam disebut *dirasah islamiyah*—dengan ilmu-ilmu “sekuler”, yang dikenal secara luas dengan sebutan ilmu-ilmu umum. Bahkan, untuk konteks masyarakat Minangkabau tempat IAIN Imam Bonjol berada, elemen yang akan diintegrasikan itu bisa ditambah lagi dengan

“ilmu-ilmu adat” yang berlaku dalam khazanah *adat Minangkabau* itu sendiri. Di sini kata “ilmu-ilmu adat” diberi tanda petik, sebab jika mengandalkan pengertian ilmiah dalam khazanah filsafat modern, pengetahuan-pengetahuan yang terkandung dalam *adat*, yang secara umum disebut kearifan lokal, belum tersistematisasi dan terverifikasi lewat metode ilmiah. Dikatakan bisa diintegrasikan karena di dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat lokal di Sumatera Barat yang mayoritas beretnis Minangkabau, apa yang disebut kearifan lokal tersebut mereka pakai untuk bersosialisasi dan bernegosiasi. Bukankah ini juga berasal dari pengetahuan, hanya saja belum tersistematisasi sedemikian rupa sehingga tidak masuk pada disiplin ilmu yang bernama etika atau pendidikan moral yang sudah tersistematisasi secara ilmiah.

Memang pengalaman IAIN Imam Bonjol selama ini menunjukkan kearifan lokal atau “ilmu-ilmu” adat Minangkabau itu sudah dikaji secara akademis. Namun dia diposisikan sebagai objek yang dibedah dan didedahkan dengan pisau analisis ilmiah, bukan dipakai sebagai pisau itu sendiri. Padahal kalau dilihat dari perjalanan sejarah, perjumpaan antara kearifan local, ilmu agama dan ilmu umum yang dibawa oleh peradaban modern telah melahirkan dinamika yang sangat kaya dan dari dinamika itulah lahir karakter kebudayaan Minangkabau kontemporer. Contohnya adalah kesenian *shalawat dulang* yang memadukan keterampilan berbahasa Minang (pantun), pemahaman tentang ajaran Islam sufistik, dan penguasaan teknik-teknik musik modern. Hasil studi monumental tentang hal ini tentu saja karya Taufik Abdullah tentang pembaharuan Islam di Minangkabau di awal abad ke-20 yang pada dasarnya adalah hasil perjumpaan tiga bentuk disiplin keilmuan tersebut di dalam kenyataan sosio-historis (Abdullah, 1966).

Sudah banyak karya-karya pemikir, dari Barat dan Timur, yang membahas proses sejarah yang melahirkan dikotomi ini serta sebab-sebabnya. Dari kalangan ilmuan dan pemikir Islam sendiri,

kita mengenal nama-nama seperti Al-Attas, Maududi, Sayeed Hosein Nashr, dan lain-lain. Namun setidaknya ada dua nama yang perlu disinggung sedikit di sini mengingat dua pendekatan khas dan kesimpulan berbeda yang mereka hasilkan. Yang pertama adalah Muzafaar Iqbal seorang fisikawan berkebangsaan Pakistan, namun menetap di Kanada. Meski pendidikan dan profesi formalnya fisikawan, dia justru mendalami studi Islam secara otodidak. Dalam buku *Science and Islam*, dia menguraikan sejarah dikotomi pengetahuan dalam pandangan Islam dengan membahas pemikiran tokoh-tokoh pemikir besar Islam mulai dari Abad Tengah sampai modern, dari zaman Nabi dan Sahabat, keemasan Islam, sampai kemunduran Islam akibat kolonialisme. Kesimpulannya dari amatan historis ini adalah bahwa penyebab antagonisme dan sikap apologetik-inferior umat Islam ketika berhadapan sains disebabkan oleh faktor psikologis akibat dampak-dampak sosio-psikologis dari modernitas (Iqbal, 2007: 188-195).

Berkebalikan pemaparan simpatik Iqbal yang menyarankan bahwa umat Islam harus mengambil inspirasi dari tradisi pengetahuan dan akademik Islam masa klasik untuk mendapatkan kekuatan dan kepercayaan diri dalam menghadapi modernitas, maka Taner Edes memberikan pendapat sinis dan pesimis. Dia menguraikan perjalanan historis dikotomi pengetahuan sebagaimana dialami oleh bangsa Turki. Dia menyimpulkan bahwa harmoni antara Islam dan ilmu tidak akan mungkin terjadi karena pertentangan keduanya. Dengan nada politis, dia menyatakan bahwa tidak semua kebudayaan dapat melahirkan dan memanfaatkan ilmu yang *genuine*. Jadi, walaupun umat Islam memang bisa melaksanakan agendanya sendiri, lepas dari modernitas Barat, namun fakta yang tidak terbantahkan saat ini adalah kemajuan di bidang sains dan teknik sudah sangat jauh di depan. Dengan kenyataan ini, umat muslim saat ini mau tak mau harus mengejar dulu ketertinggalannya sebelum membikin agenda sendiri (Edes, 2007: 164).

Terlepas dari perbedaan asumsi dasar dan pendekatannya terhadap masalah sejarah dikotomi ini, namun hampir semuanya bersepakat untuk berusaha menyatukan keduanya dan menyatakan secara tegas integralisme pengetahuan dalam pandangan Islam. Persoalannya adalah bagaimana mewujudkan reintegrasi itu ke dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi berbentuk universitas. Hal ini memerlukan pendalaman dan pendasaran filosofis yang ketat.

Pertama-tama perlu kiranya ditinjau secara kritis wacana integrasi ilmu agama Islam dan ilmu “sekuler” yang harus diakui menjadi paradigma umum yang dipakai sebagai landasan epistemologis peralihan beberapa IAIN menjadi UIN di Indonesia dalam rangka menerjemahkan mandate yang lebih besar yang diberikan negara kepada PTAIN.

Wacana integrasi tersebut adalah salah satu dari tipologi hubungan agama (*religion*) dan ilmu (*science*) yang dikemukakan oleh Ian Barbour dalam buku utamanya berjudul *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues, A Revised and Expanded Edition of Religion in an Age of Science* (1997). Empat tipologi hubungan tersebut adalah konflik, independensi, dialog dan integrasi. Tipe hubungan konflik mengandaikan agama dan ilmu bersifat antitesis: keduanya tidak akan pernah mencapai titik temu. Tipe independensi berarti bahwa keduanya memiliki metode, bahasa dan pandangan-dunia yang berbeda sehingga upaya yang melebihi sekadar analisis perbandingan akan merusak tabiat dan hakikat salah satu keduanya.

Tipologi dialog mengandaikan adanya kemungkinan hubungan saling menghormati dan saling tidak mencampuri antarkeduanya. Dalam hubungan keduanya, agama dan ilmu mengakui bahwa klaim yang dibuat oleh ilmuan maupun agamawan bisa saja saling beririsan dalam isu-isu tertentu. Interaksi dialogis keduanya dimungkinkan ketika perangkat konseptual metodologi dan prapengandaian metafisis dua domain menunjukkan kemungkinan terjadinya

pertukaran yang produktif. Di sini yang dipersyaratkan adalah telaah yang mendalam atas titik singgung dua domain ini dan di mana letak persamaan dan perbedaan secara metodologis antara keduanya. Jika telaah ini tidak mendalam dan hanya pada permukaan, maka yang terjadi hanyalah pengintegrasian yang terlalu bersemangat. Sedangkan yang terakhir, tipe integratif, berarti dalam hubungan keduanya terjadi integrasi metodologis dan ontologis akibat adanya paralelitas epistemologis dan/atau sistem metafisis ilmu dan agama.

Bentuk integrasi agama dan ilmu yang paling cepat kelihatan adalah wacana yang memformulasi doktrin agama lewat teori-teori ilmiah. Sementara bentuk yang lebih subtil adalah wacana yang membangun *a systematic synthesis that reflects a coherent worldview with an inclusive metaphysics* (Bateman, 2008) [suatu sintesa sistematis yang mencerminkan satu pandangan-dunia yang koheren berdasarkan metafisika inklusif]. Inilah kiranya yang kemudian diterjemahkan oleh Amin Abdullah (2006) dengan model paradigma keilmuan Islam “jaring laba-laba” yang jadi dasar pengembangan UIN Sunan Kalijaga dan model paradigma keilmuan Islam “integratif” yang jadi model pengembangan UIN Syarif Hidayatullah. Kedua model paradigma ini kemudian diikuti dengan beberapa modifikasi sana-sini oleh UIN-UIN lain. Sintesis yang mencerminkan pandangan-dunia dalam sebuah metafisika inklusif tersebut berwujud model epistemologi hermeneutis hasil modifikasi atas tiga macam gugus epistemologi ilmu agama Islam menurut al-Jabiri dengan meminjam metode hermenutika gerak bolak-balik dari Fazlur Rahman.

Paradigma integrasi dari Ian Barbour yang jadi dasar pengembangan keilmuan Islam di beberapa UIN yang telah dirintis selama satu dasawarsa ini telah memperlihatkan capaian-capaian positifnya. Prestasi yang patut dibanggakan dari pengalaman beberapa UIN itu adalah adanya geliat untuk mendialogkan asumsi ontologis dan aksiologis antara ilmu dan agama Islam dalam wacana

akademis di universitas. Capaian positif lain adalah para akademisi muslim yang tergabung dalam UIN, baik mahasiswa maupun dosen, telah berusaha menerjemahkan paradigma integratif itu ke dalam kurikulum, penelitian, pengembangan institusi. Wacana yang lahir dari penerjemahan ini langsung berimplikasi pada pemahaman masyarakat muslim secara umum atas persoalan-persoalan yang dihadapinya sehari-hari. Masyarakat muslim pelan-pelan mulai memahami bahwa persoalan doktrinal “bisa” didekati secara ilmiah, dan persoalan ilmiah seperti ekonomi makro juga “bisa” dibicarakan dalam konteks doktrinal.

Di atas, kata “bisa” sengaja diberi tanda petik sebab prestasi positif yang lahir dari paradigma integratif-dialogis antara ilmu agama Islam dan ilmu umum baru sebatas pemahaman bahwa yang satu bisa didekati atau dibicarakan dengan bahasa yang lain berkat adanya paralelitas-paralelitas ontologis dan sistematisasi persinggungan keduanya pada level epistemologis. Integrasi itu baru sebatas pemahaman dan kesadaran bahwa ternyata surat Al-fatihah pun bisa dibaca dengan teori-teori linguistik atau teori sastra mutakhir, bahwa problematisasi dan teoretisasi atas masalah zakat bisa jadi alternatif teori dan kebijakan ekonomi makro, bahwa teori-teori ilmu eksakta juga bisa dijelaskan hikmah-hikmahnya lewat doktrin-doktrin agama Islam. Cuma sebatas itu. Dalam sebuah tulisannya, seorang mahasiswa mengungkapkan refleksinya tentang proses integrasi ini dengan menyatakan bahwa tak jarang mahasiswa dan para dosen belum memahami esensi dan tujuan mengapa setiap judul skripsi atau penelitian harus diembel-embeli “Islam”. Mereka hanya tahu bahwa kalau mengusulkan tema skripsi harus “ada” Islamnya (Darsono, 2014: 144)

Mengapa ini bisa terjadi? Sebabnya adalah pengalaman masyarakat atau komunitas akademis tempat tipologi Barbour tadi muncul, dan prioritas yang diberikan pada tipe hubungan integratif,

adalah pengalaman kultural masyarakat di negara Eropa dan Amerika Utara. Di sana, *the discussion has focused mainly on the latest scientific theories and discoveries or the most recent theological attempts to integrate the scientific with a religious world-view*. [perdebatan terutama tertuju pada teori dan penemuan ilmiah paling mutakhir atau upaya teologis paling anyar dalam usaha menyatukan pandangan-dunia ilmiah dengan pandangan-dunia religius] (Terence Bateman, 2008) Sementara pengalaman yang dilalui masyarakat muslim Indonesia jauh berbeda, mengingat posisinya sebagai masyarakat dunia ketiga yang harus jadi penonton dan konsumen di posisi *ephemeral*.

Hal lain yang membuat masyarakat muslim Indonesia sangat berbeda dari masyarakat tempat tipologi Barbour tadi berlaku secara ideal adalah kebhinekaan yang jadi rahmat sekaligus cobaan. Berdasarkan pengalaman kultural sebagai masyarakat *ephemeral* dan *majemuk* ini integrasi antara ilmu dan agama tidak akan muncul dalam isu-isu teoretis sebagaimana tempat asalnya di negara maju, melainkan *in the form of a confrontation of cultures that demands what is essentially an ethical issues*. [dalam wujud konfrontasi antarbudaya yang sebenarnya memerlukan isu-isu etis] Meski lembaga akademis seperti institut atau universitas adalah tempat di mana isu-isu teoretis dialami dan dikritisi, namun ketika integrasi model Barbour ini diterapkan di lembaga akademis Islam di Indonesia, isu-isu teoretis itu tidak muncul dari kegelisahan eksistensial seorang muslim yang dianugerahi akal oleh Allah untuk membaca ayat-ayat-Nya, melainkan tuntutan administrasi dan birokrasi akademis. Sebab, kegelisahan paling mendasar masyarakat muslim Indonesia, maupun rakyat Indonesia secara umum, adalah kegelisahan etis tentang nilai mana yang akan dijadikan panduan menjalani hidup. Di masyarakat demokratis dan maju, pandangan sekuler atau bahkan ateistik-humanis merasuk sampai ke tulang sumsum. Sementara di masyarakat Indonesia, pilihan sekuler dalam arti sebenar-benarnya kata ini masih menyisakan dilema eksistensial dan sosial.

Semangat integrasi dan dialog antara ilmu agama dan ilmu umum di UIN yang terinspirasi dari tipologi Barbour harus diapresiasi secara kritis, karena: *pertama*, pola hubungan integratif-dialogis inilah yang paling mungkin dan memang dibutuhkan masyarakat muslim Indonesia. *Kedua*, perlu dikritisi sebab pengalaman masyarakat muslim Indonesia berbeda dari pengalaman yang masyarakat yang diandaikan secara teoretis dalam tipologi Barbour. Hal yang dapat dilakukan untuk memodifikasi model integratif-dialogis Barbour ini adalah mengakui dan melibatkan unsur agen, rasionalitas, dan budaya tempat ilmu agama dan ilmu umum itu berhubungan. Proses integrasi antara keduanya harus mempertimbangkan peran determinatif ketiga faktor ini. Tujuannya modifikasi ini adalah untuk menemukan *a model of rationality that reveals the possibility of shared sources of rationality between theological and scientific form of reflection and moves beyond the epistemological dichotomy of foundationalist objectivism and nonfoundationalist relativism* (Bateman, 2008: 3) [model rasionalitas yang memperlihatkan kemungkinan adanya sumber rasionalitas bersama antara refleksi teologis dan ilmiah dan kemungkinan untuk melampaui dikotomi objektivisme fondasionalis dan relativisme non-fondasionalis]

Dalam konteks pengembangan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol, tak pelak lagi model rasionalitas sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dibangun dan dikembangkan di wilayah persinggungan tiga wilayah yang akan menjadi tempat civitas akademiknya berefleksi baik secara teologis maupun ilmiah, yaitu *hadharah an-nash* (ranah tekstual); *hadharah al-'ilm* (ranah keilmuan saintifik), dan *hadharah al-falsafah* (ranah etis-filosofis) (Amin Abdullah, 2006: 404-406). Model rasionalitas tersebut sudah pasti bersifat posfondasionalis, dalam arti tidak lagi mengklaim ada suatu kenyataan objektif yang dapat jadi dasar dari segala perspektif. Rasionalitas posfondasionalis ini akan memfasilitasi dialog dan saling mengisi antar berbagai wacana dan konteks, dan menghasilkan

pemahaman-pemahaman bersama yang sifatnya tentatif, tidak mutlak. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim telah menemukan kebenaran hakiki dan memaksa pihak lain untuk menerima klaim tersebut.

Bagaimana cara untuk mewujudkan hal ini? Caranya adalah dengan menerapkan metode yang disebut Stenmark sebagai *the method of wide reflective equilibrium* (keseimbangan reflektif yang menyeluruh). Stenmark menjelaskan keseimbangan reflektif ini sebagai

a moving across and between disciplines and contexts in search of a reasonable and responsible judgment of the particular issue at hand. It enables prior commitments to be enriched, modified and corrected in the cross-disciplinary and intercontextual referencing across boundaries of rationality and culture. It provides a model of reasoning that grants priority of foundation to no particular discipline or position, allowing a self-correcting strategy to yield tentative and provisional results that can never be coalesced into universal norms (Bateman, 2008, 6).

[gerak yang menjelajahi berbagai disiplin dan konteks dalam mencari satu penilaian yang masuk akal dan bertanggung jawab terkait satu isu partikular yang dihadapi. Gerak ini dapat memperkaya, memodifikasi dan mengoreksi komitmen awal dengan merujuk secara lintas-disiplin dan antarkonteks beragam batas rasionalitas dan kebudayaan. Ia menyediakan model penalaran yang tidak mengutamakan disiplin atau posisi tertentu, membuka kemungkinan melakukan koreksi diri ketika berpegang pada hasil-hasil yang tentatif dan sementara yang tak bisa diangkat menjadi ketentuan universal.]

Dalam bahasa yang lebih konkret, Francis Shussler Fiorenza (1984) menggambarkan keseimbangan reflektif yang luas ini sebagai gerak maju dan mundur bagai pendulum antara komitmen personal, keyakinan doktrinal dan tilikan ilmiah yang kemudian mampu menciptakan keseimbangan antarberbagai prinsip dasar yang direkonstruksi dari praktik melalui praktik itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, sebuah universitas adalah tempat berbagai disiplin ilmu saling berinteraksi. Kekhawatiran yang berada

di balik wacana pentingnya mendudukan hubungan ilmu dan agama dan mengurai sengkabut akibat dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama Islam adalah terpinggirnnya wacana keilmuan Islam itu sendiri, entah karena alasan teologis-normatif, teoretis-epistemologis, maupun alasan ekonomi-politik. Kekhawatiran ini akan berubah jadi kenyataan jika prinsip-prinsip dasar tempat berbagai disiplin yang saling berinteraksi semata-mata hanyalah generalisasi atas penilaian dan praktik yang sangat kontekstual. Rasionalitas yang menekankan keseimbangan reflektif memungkinkan setiap disiplin dengan prinsip dasarnya masing-masing untuk mempertanyakan dirinya secara kritis (Bateman, 2008: 7).

Pertimbangan-pertimbangan filosofis di atas dikemukakan untuk menegaskan ke-universitas-an Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sekaligus sebagai landasan untuk mewujudkan suatu universitas dalam pengertian dasariahnya. Universitas modern sebagaimana yang dikenal sekarang berasal dari Abad Pertengahan. Kata universitas selalu diiringi oleh dua kata Latin lain yang selengkapnya berbunyi *universitas magistrorum et scholarium*: kumpulan atau keseluruhan dosen dan mahasiswa yang bersama-sama berusaha mencari, menemukan dan mengomunikasikan kebenaran (M. Sastrapratedja, S.J, 2001).

Dari rumusan *universitas magistrorum et scholarium* tersebut dua hal yang dijadikan panduan bagi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol: yakni aspek *komuter*, bahwa universitas adalah perkumpulan dosen dan mahasiswa; dan aspek *komitmen* mereka pada pencarian kebenaran dan mengekspresikannya. Dari aspek komuternya sudah jelas terbayang adanya kemajemukan, dan oleh karena itu, interaksi. Di universitas, interaksi yang paling dasar terjadi antardisiplin beserta prinsip dasar ontologis, pengandaian epistemologis, komitmen nilai, dan perangkat metodologis masing-masing. Kesemuanya bersatu, mengalami unifikasi, dalam sebuah

komitmen pencarian kebenaran dan mengomunikasikannya. Inilah cara kerja produksi pengetahuan di universitas yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat luas dalam bentuk publikasi.

Bagaimana kalau yang terjadi bukan kesatuan sebagaimana yang termaktub pada kata “uni” di universitas? Bagaimana kalau yang terjadi justru antardisiplin keilmuan tersekat-sekat baik oleh alasan internal disiplin itu sendiri dari segi ontologis, epistemologis, metodologis dan aksiologisnya maupun oleh tujuan-tujuan eksternal seperti permintaan penguasa atau pengusaha? Jawabannya adalah yang akan tercipta bukan universitas, melainkan multiversitas!

Hal ini sangat diperhatikan dalam rancangan peralihan IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol mengingat tabiat keilmuan yang dikembangkan selama ini di IAIN sebagai sebuah institut lebih bersifat pendidikan profesi. Lulusannya diharapkan atau setidaknya dipandang sebagai orang yang akan profesional di bidang ilmu agama. Jika cara berpikir ini tetap mewarnai Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sebagai universitas, maka yang terjadi adalah antardisiplin tidak berkomitmen pada pencarian kebenaran melainkan pada profesi yang diandaikan setiap disiplin. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana merumuskan suatu paradigma keilmuan universitas yang akan jadi dasar dan panduan bagi Universitas Islam Nusantara dalam kegiatan akademiknya?

2.4. LANDASAN FILOSOFIS PARADIGMA KEILMUAN ISLAM NUSANTARA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

Pertama, ontologis. Secara ontologis, kenyataan yang dihadapi oleh civitas akademika di sebuah universitas selalu bersifat multidimensional. Baik dosen maupun mahasiswa secara individual di universitas tidak bisa menghadapi kenyataan yang utuh dan

mutlak. Dari segi objek material, ada kenyataan yang disebut alam objektif-empiris; ada yang berbentuk relasi dan pertukaran antarmanusia maupun antara manusia dengan alam; dan ada yang berupa pengalaman subjektif-internal manusia itu sendiri. Yang pertama dihadapi oleh disiplin ilmu alam, yang kedua disiplin ilmu sosial, dan yang terakhir disiplin ilmu humaniora. Pembidangan disiplin ilmu pengetahuan berdasarkan trikotomi kenyataan ontologis ini sudah dikenal sejak ribuan tahun.

Selain pembagian kenyataan ontologis seperti di atas, ada lagi pemilahan lain, kali ini berdasarkan sudut pandang cara kerja ilmu yang akan dihasilkan ketika menghadapi kenyataan. Ada produk ilmu pengetahuan yang tabiatnya membaca/menjelaskan (eksplanasi). Kenyataan yang dihadapi oleh ilmu yang bertabiat seperti ini adalah kenyataan tekstual (teks). Di sini batas ilmu alam maupun ilmu sosial dalam pembagian yang sebelumnya menjadi sumir, sebab yang diartikan sebagai teks bukan hanya teks tertulis saja, melainkan alam pun dijadikan bentangan teks. Ada lagi ilmu pengetahuan yang kerjanya menafsirkan/memahami. Kenyataan yang dihadapi dengan ilmu pengetahuan dengan tabiat ini adalah kenyataan relasi sosial. Terakhir, ada lagi ilmu pengetahuan yang kerjanya mengungkapkan/melepaskan (artikulasi). Kenyataan yang dipelajari oleh semacam ini adalah pengalaman subjek. Di sini dapat ditegaskan bahwa Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol menganut ontologi pluralisme, bukan monism. Artinya kenyataan dipahami berdimensi banyak akibat keterbatasan manusia itu sendiri.

Kedua, epistemologi. Pluralisme ontologis di atas berimplikasi secara logis pada sifat epistemologi dan metodologi yang akan dijadikan landasan pengembangan keilmuan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol. Implikasi itu adalah kemajemukan epistemologis dan metodologis. Lebih dua millennium lalu, Aristoteles sudah menyatakan ini dalam bukunya *Nichomachean Ethics*, sebagaimana dipaparkan Chaim P. Perellman,

“it is evidently equally foolish to accept probable reasoning from a mathematician and to demand from a rhetorician scientific proofs” (Book 1, 1094b) [...] *for a carpenter and a geometer investigate the right angle in different ways: the former does so insofar as the right angle is useful for his work, while the latter inquires what it is or what sort of thing it is.*” (Book 1, 1098). (Perellman, 1979)

[orang yang menerima penalaran probabilitas dari seorang matematikawan sama bodohnya dengan orang yang meminta bukti ilmiah dari seorang retorikawan (Buku 1, 1094b) [...] seorang tukang kayu dan seorang ahli geometri menyelidiki sudut dengan cara berbeda: yang pertama melakukannya sejauh sudut bermanfaat bagi pekerjaan dan karyanya, sementara yang kedua menyelidiki apa dan bagaimanakah sudut itu sendiri.

Menghadapi kenyataan ontologis diartikan dalam trikotomi pengetahuan alam, sosial, dan humaniora, maupun trikotomi teks, relasi sosial dan pengalaman subjek, tradisi pemikiran Islam di masa keemasannya sudah memiliki tiga model epistemologis yang dipakai untuk mengetahui kenyataan- kenyataan tadi. Ketiga macam epistemologi tersebut adalah *bayani* (interpretasi tekstual), *burhani* (pembuktian empiris maupun logis) serta *irfani* (insight pengetahuan pengalaman subjektif). Dalam epistemologi filsafat Barat modern pun dikenal aliran epistemologi empirisisme dan rasionalisme beserta segenap varian positivistik, dan belakangan di era postmodernisme dikenal pula aliran epistemologis pragmatisme-relativistik yang antiesensialis.

Tanpa diuraikan satu persatu paradigma epistemologis yang memayungi masing-masing tipe pengetahuan ini dan bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain, yang jelas secara ideal di dalam sebuah universitas semuanya berada di satu komunitas akademis (*komuter*) yang bersama-sama mencari kebenaran. Hal yang sama juga berlaku bagi metodologi. Kenyataan tekstual didekati dengan metodologi yang cocok untuk mendapatkan penjelasan, kenyataan relasi sosial didekati dengan metodologi yang cocok untuk

mendapatkan pemahaman, kenyataan pengalaman subjektif didekati dengan metodologi yang cocok untuk mendapatkan/memunculkan artikulasi.

Ketiga, aksiologi. Pada tingkat pertimbangan nilai pada akhirnya semua kegiatan akademik di sebuah universitas terpulung pada pembelaan kemanusiaan secara universal. Di titik ini, paradigma aksiologis dari Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah pluralisme aksiologis. Sebab Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memahami bahwa nilai dalam diri manusia bisa datang dan dipilih dari beragam sumber berkat interaksinya dengan manusia dan kebudayaan lain (pluralisme sosiologis). Benang merah yang mengaitkan antarnilai ini adalah tak ada satu komunitas manusia pun yang tidak menempatkan manusia sebagai taruhan pertimbangan nilainya.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menerjemahkan poin-poin abstrak dan filosofis tadi ke dalam suatu paradigma universitas yang cocok untuk dikembangkan di Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol? Jawabannya adalah memandang prinsip bahwa agen (civitas akademika), rasionalitas (tradisi intelektual) dan budaya (tradisi sosial-budaya) sebagai faktor determinan dalam hubungan agama dan ilmu. Jika hal ini tidak dipertimbangkan, ada dua risiko yang akan menghadang. *Pertama*, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum akan terus berlangsung, walau dalam bentuk lain yang justru lebih sengit. Kalau dulu antara IAIN dan universitas umum, sekarang antar fakultas dan jurusan di dalam satu universitas bernama Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol. *Kedua*, integrasi itu akan premature dan bersifat eksklusif karena hanya pada isu-isu teoretis, sementara yang dibutuhkan oleh agennya dan masyarakat adalah jawaban atas isu-isu etis yang mengemuka di kehidupan sosial budaya mereka.

Filosofi pengembangan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol didasarkan pada pluralisme aspek ontologis, epistemologis/metodologis, dan aksiologis di atas. Ketiga aspek filosofis tersebut bertitik tolak dari prinsip dasar kebudayaan Minangkabau, yaitu keseimbangan dalam pertentangan. Sebagaimana yang dirumuskan M. Nasroen,

“Sebuah dasar yang terutama pentingnja dalam hidup orang Minangkabau dan oleh sebab itu terkandung dalam tiap-tiap realisasi hidup itu, jaitu dalam soal menjalankan hidup orang-seorang, hidup bermasyarakat... ekonomi, dsb., jaitu prinsip: keseimbangan dalam pertentangan. (M. Nasroen, 1959: 127).

Sepintas lalu prinsip “kesimbangan dalam pertentangan” ini dapat diidentikkan dengan dialektika, namun sebagaimana yang selanjutnya ditegaskan M. Nasroen “dialektika tidak memberikan jalan keluar terhadap pertentangan-pertentangan,” dengan kata lain dialektika adalah jalan mengatasi pertentangan. Namun, dalam kebudayaan Minangkabau pertentangan dipandang sebagai yang normal dan tidak bisa diatasi. Pertentangan justru dijadikan pedoman dengan mengandalkan prinsip perimbangan-pertentangan (Shalihin, 2003). Pertentangan tidak bisa diatasi dengan cara dialektika, karena sintesa muncul dari *natuurlick process* (M. Nasroen, 1959: 134). Pertentangan juga tidak bisa diatasi dengan semacam pengintegrasian, yang diisitilah Nasroen dengan *co-existencie*, karena pada hakikatnya ini adalah semacam gencatan senjata belaka untuk sementara waktu. Jika keadaan berubah, pertentangan itu akan menimbulkan gesekan lagi (M. Nasroen, 1959: 138).

Pertentangan-pertentangan yang ada diselesaikan dengan melakukan penyeimbangan. Asumsinya adalah bahwa manusia yang menghadapi pertentangan kenyataan, atau bahkan dia sendiri yang bertentangan dengan manusia lain, harus *aktif* membuat keseimbangan, bukannya pasif menunggu datangnya anti-tesis sehingga dengan demikian dia bisa berharap lahir hal baru sebagai sintesis.

Dengan prinsip perimbangan dalam pertentangan ini, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memahami pluralisme sebagai pertentangan-pertentangan yang saling berinteraksi untuk kemudian menghasilkan satu hal baru tanpa menyalakan hal-hal yang bertentangan tadi. Ini adalah prinsip dialektika di mana satu hal yang menjadi tesis ketika bertemu secara diametrik dengan hal lain (antitesis) niscaya akan menghasilkan hal baru (sintesis), namun substansi tesis dan antitesis tetap ada. Prinsip pertentangan dalam perimbangan ini bisa terlaksana jika adanya satu kesadaran dan pengakuan tentang kepentingan bersama. Ini selaras dengan pernyataan M. Nasroen ketika menjelaskan syarat agar prinsip ini berlaku dalam kebudayaan minangkabau.

Dasar perimbangan pertentangan ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat Minangkabau, ialah oleh karena masyarakat Minangkabau, . . . , sesungguhnya berdasarkan pandangan hidup yang berdasarkan budi, hidup bersama, serasa, dan mengakui adanya kepentingan bersama. (M. Nasroen, 1959: 134)

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memahami interaksi dialogis antara ilmu umum dan ilmu agama, maupun beragam disiplin dengan pengandaian ontologis, epistemologis/metodologis dan aksiologisnya berdasarkan prinsip perimbangan dalam pertentangan ini. Sebab, sebagai universitas, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memiliki satu kepentingan bersama, yakni mengabdikan pada kebenaran dengan cara mencari dan mengomunikasikannya. Interaksi ini bersifat multidimensional sebab dimensi yang saling berhubungan bukan hanya antara dua entitas yang masing-masing berdimensi tunggal, melainkan multidimensi. Ilmu dan agama berdimensi banyak karena ada campur tangan agen, rasionalitas dan budaya di dalamnya. Model dialog multidimensional antara agama dan ilmu ini digambarkan Stenmark sebagai

a relational model . . . that takes into account the fact that science and religion are social and dynamic practices and thus not static entities.

Therefore it is not possible to determine a priori where the borderline goes between science and religion since that could change as these practices develop and transform over time. (Stenmark, 2004: 12) [sebuah model relasional yang menjelaskan fakta bahwa ilmu dan agama adalah praktik sosial yang dinamis dan karena itu bukan entitas yang statis. Oleh karena itu mustahil kiranya menetapkan secara a priori di mana garis batas (persinggungan) antara ilmu dan agama karena batas itu akan berubah seiring perubahan dan perkembangan praktik dalam perjalanan waktu.]

Prinsip ini adalah prinsip ideal, dan oleh karena itu dapat ditemukan dalam paradigma keilmuan UIN-UIN lain. Yang menjadi kekhasan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah model yang dipakai dalam menerjemahkannya agar bisa implementatif. Untuk tujuan ini, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memakai Retorika-Baru (*New Rhetorics*) sebagai paradigma implementasinya (Perellman, 1979).

Berbeda dengan zaman Aristoteles dulu, retorika di zaman modern disalahartikan sebagai seni menemukan sarana dan teknik berbahasa untuk menundukkan lawan bicara. Padahal sebagai seni yang dikembangkan dalam masyarakat *polis* Yunani, retorika bermakna sebagai seni invensi (menemukan sarana persuasi dalam berargumentasi) dan sebagai seni menilai (mengenali persuasi yang bagaimana yang dapat diterima dalam sebuah wacana), dan terakhir ada pula yang menempatkannya sebagai semacam teori kritis, dalam arti upaya menemukan apa yang menjadikan satu persuasi bersifat persuasif (Emmel, 2008: 89).

Dalam dialog antardisiplin di tingkat universitas tiga pengertian fungsional retorika ini dapat diwujudkan sebab kesimpulan-kesimpulan (kebenaran) yang diperoleh satu disiplin mesti didialogkan dengan kesimpulan disiplin lain yang sudah pasti berbeda karena adanya pluralisme. Proses ini bertumpu pada argumentasi yang didasarkan pada temuan-temuan satu disiplin untuk mendukung atau menolak (mempersuasi) argumen disiplin lain yang juga didasarkan pada temuan-temuannya. Perimbangan

dari pertentangan-pertentangan antardisiplin ini akan muncul dari kemampuan satu disiplin menilai argumen lawan apakah meyakinkan atau tidak dan mengkritisi argumen sendiri jika satu disiplin tidak mampu meyakinkan lawan.

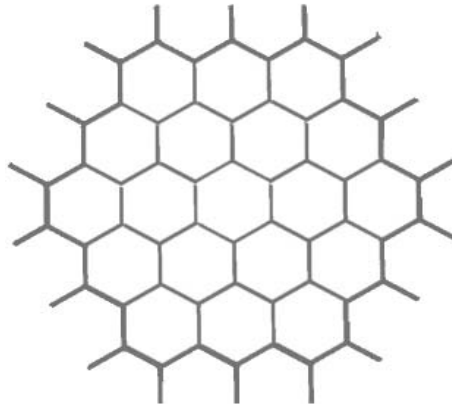
Praktik seperti di atas dimungkinkan terjadi jika kerja akademis (*academic enterprise*) di lingkungan universitas benar-benar dipayungi oleh paradigma universitas sesungguhnya: mengabdikan pada kebenaran! Selain itu prasyarat yang perlu dimiliki setiap civitas akademika yang mewakili satu disiplin dalam rangka mewujudkan integrasi-dialogis ini adalah *positioning* dan kritik-diri. *Positioning* berarti menyadari di mana posisi disiplinnya berhadapan dengan disiplin-disiplin lain, sementara kritik-diri berarti menyadari asumsi dan tabiat filosofis disiplin sendiri. Ini sekaligus menjadi spirit etika akademis yang akan dipakai oleh para civitas akademika. Pada tingkat implementatif, prinsip etika akademis ini dapat dibangun dengan membekali civitas akademika dengan filsafat pengetahuan dan kritik-ideologi. Dengan cara inilah pengabdian pada kebenaran itu bisa dijadikan sebagai kepedulian seluruh pihak, menjadi kepentingan bersama.

Paradigma interaksi-dialogis yang dikembangkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sebagaimana diuraikan di atas secara metaforis dapat dianalogikan dengan *an-Nahl* (lebah dan sarangnya). Setiap seekor lebah memiliki sarang berbentuk segi enam (heksagonal) yang terintegrasi dengan sarang lebah lain. Masing-masing sarang tidak berbaur atau bergabung dengan yang lain, namun terintegrasi dalam satu kesatuan kerja: menghasilkan madu. Madu lahir dan bisa dinikmati manusia karena di dalam sarangnya lebah bekerja sendiri-sendiri sekaligus bersama-sama.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol ibarat kumpulan bidang heksagonal yang *mutually exclusive* namun membentuk satu kesatuan. Bidang-bidang itu bisa merepresentasikan disiplin ilmu,

fakultas, jurusan, jenis metodologi dan pendekatan, asumsi nilai, dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya sarang lebah, masing-masing bidang independen namun sekaligus terkait dengan bidang lain.

GAMBAR 2.1. PARADIGMA INTERAKSI-DIALOGIS



Dalam gambar, struktur permukaan sarang lebah; bagian terluar sengaja dibiarkan terbuka untuk menunjukkan bahwa bidang-bidang ini bisa ditambahi tanpa kesudahan, sehingga dapat berkembang seluas alam, dan jika dilipat bisa selebar kuku; *kalau di lipek salaweh kuku, kalau di leba salaweh alam*. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak ingin membatasi perubahan dan perkembangan, *sekali air besar, sekali tepian berubah*, begitu hikmah yang diberikan budaya Minangkabau. Di dalam kemungkinan perkembangan yang bisa mencapai seluas alam inilah ungkapan budaya *Alam Berkembang Jadi Guru* mendapatkan momentumnya.

Adapun “madu” yang akan dihasilkan “seekor lebah” di dalam setiap sarang adalah *Islam Nusantara*. Islam Nusantara adalah pengetahuan yang lahir dari dialektika antara dua unsur: unsur abstrak/batin dan unsur konkret/zahir. Masing-masing unsur terdiri dari tiga, sehingga ada enam sub-unsur yang jadi enam sisi pembentuk bidang heksagonal. Unsur abstrak itu adalah Ontologi; Epistemologi/Metodologi; dan Aksiologi. Unsur konkret adalah

Karakter Akademis, Etika Akademis, dan Pilar Akademis.

Bidang heksagonal kerangka dasar keilmuan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol ini dapat disebut kerangka keilmuan Islam Nusantara. Unsur-unsur pembentuk Keilmuan Nusantara itu juga ada enam yaitu manusia, *an-nabl*, etis, etos, cerdas dan cendekia. Kerangka ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

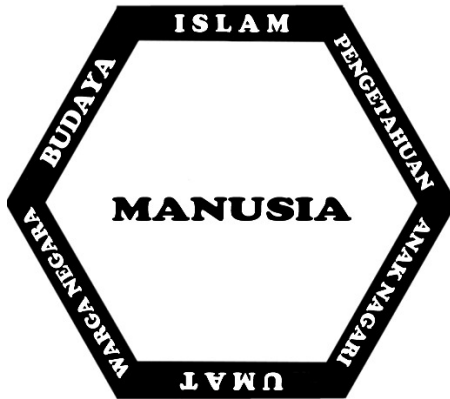
GAMBAR 2.2. HEKSAGONAL KEILMUAN



Enam unsur pembentuk keilmuan Islam Nusantara Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol di atas lahir dari dialektika yang terjadi dalam kerangka Keilmuan Islam Nusantara tadi, yakni dialektika antara tiga unsur abstrak dengan tiga unsur konkret.

Sisi ontologi bertumpu pada manusia. Maksudnya, realitas apa pun, dikategorikan dengan cara bagaimana pun, tetaplah bertumpu pada manusia. Realitas ada sejauh manusia ada. Sisi ontologi yang bertumpu pada manusia ini juga digambarkan secara heksagonal. Yang terjadi di bidang ontologis ini juga dialektika, yakni antara subjek/posisi agen dan objek/bidang realitas: umat dengan Islam/agama; warga budaya dengan kebudayaan; dan, warga negara dengan pengetahuan. Dialektika di bidang ontologis inilah yang dialami oleh manusia dalam keilmuan Islam Nusantara.

GAMBAR 2.3. HEKSAGONAL ONTOLOGI



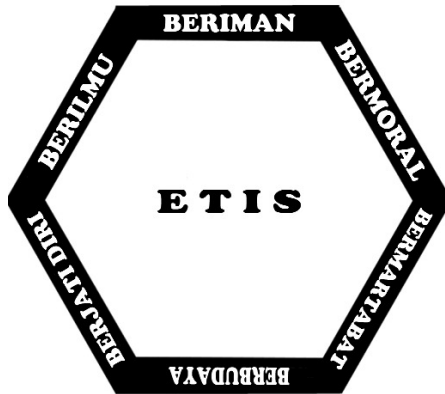
Sisi epistemologi bertumpu pada cara kerja *an-nahl* yang mandiri sekaligus bersama-sama, individualis sekaligus komunalis. Pencarian pengetahuan dengan berbagai cara (*episteme*) dilakukan dengan cara mandiri namun demi tujuan bersama. Setiap lebah mencari sari bunga sendiri-sendiri untuk bersama-sama menghasilkan madu. Bidang epistemologi ini juga berbentuk heksagonal yang bersisi enam, dan di dalamnya juga terjadi dialektika antara dua unsur, antara wilayah cara bernalar dengan wilayah realitas, yakni: cara bernalar yang deduktif dengan realitas konseptual; induktif dengan realitas faktual; dan abduktif dengan realitas imajinatif.

GAMBAR 2.4. HEKSAGONAL EPISTIMOLOGI



Sisi aksiologis bertumpu pada prinsip etis. Pada tataran nilai, seorang akademisi harus bermoral, dan moral selalu berdialektika dengan jati diri. Seorang akademisi harus beriman, dan iman selalu berdialektika dengan budaya. Seorang akademisi harus berilmu, dan ilmu selalu berdialektika dengan martabat.

GAMBAR 2.5. HEKSAGONAL AKSIOLOGI



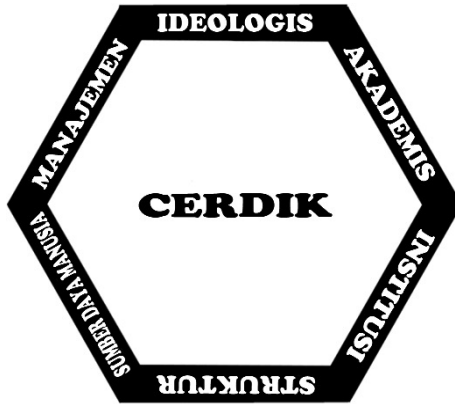
Sisi karakter akademis bertumpu pada etos. Etos adalah hasil dari dialektika antara dua wilayah: wilayah batin dan zahir. Dialektika itu terjadi antara keahlian dengan kerendahhatian, keteguhan dengan kejujuran; keuletan dengan bermanfaat.

GAMBAR 2.6. HEKSAGONAL KARAKTER AKADEMIS



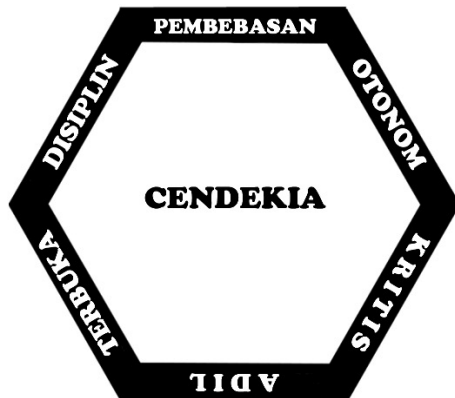
Sisi pilar akademis bertumpu pada kecerdikan atau kreativitas. Kecerdikan itu adalah hasil dari dialektika antara dua wilayah yang juga bersifat batin dan zahir. Unsur SDM dengan ideologi; akademis dengan infrastruktur; dan, manajemen dengan institusi.

GAMBAR 2.7. HEKSAGONAL PILAR AKADEMIS



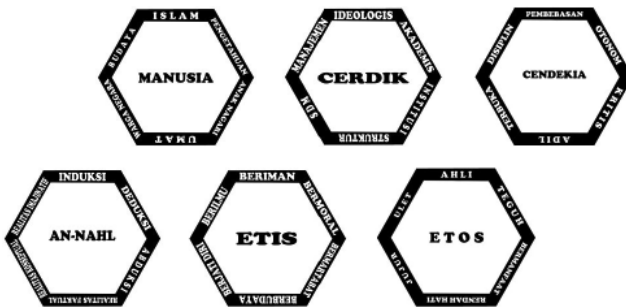
Sementara sisi yang terakhir, sisi etika akademis, bertumpu pada kecendekiawanan. Sisi ini juga terdiri dari enam sisi yang terbagi menjadi dua hal yang menciptakan dilema moral akademisi dan keduanya saling berdialektika. Dialektika itu berlangsung antara keadilan dan kebebasan; disiplin dan sikap kritis; serta otonomi dengan keterbukaan.

GAMBAR 2.8. HEKSAGONAL ETIKA AKADEMIS



Maka dari rincian di atas, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol menganut filosofi keilmuan Islam Nusantara yang berarti bahwa keilmuan tersebut menghasilkan manusia sebagaimana *an nahl* yang memiliki komitmen etis dalam hidup, etos yang tinggi dalam berkarya, cerdas dalam bernegosiasi dan cendekia dalam berjuang. Rumusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.9. HEKSAGONAL FILOSOFI KEILMUAN ISLAM NUSANTARA



Filosofi keilmuan Islam Nusantara sesungguhnya adalah hasil perasan dialektika dua hal: subjek dan objek, dialektika posisi agen dan bidang realitas. Filosofi ini menghasilkan dua hal yang sesungguhnya merupakan hasil dialektika subjek dan objek. Dua hal tersebut adalah keseimbangan dan kedaulatan. Pengetahuan yang lahir, dihayati, diamalkan dan dikritisi oleh civitas akademika Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol bersifat perimbangan atas pertentangan-pertentangan hal ihwal yang ditelaah. Sementara kedaulatan adalah kedaulatan civitas akademika ketika menghadapi pertentangan-pertentangan itu. Pengetahuan dalam keilmuan Islam Nusantara tidak menghindari dan menutup diri dari pertentangan-pertentangan yang ada, namun juga tidak larut atau melarutkan diri ke dalamnya atau ke dalam salah satu pihak yang bertentangan.

Ijtihad keilmuan (*academic enterprise*) Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol pada akhirnya adalah kerja dan karya yang

terus menerus melakukan perimbangan pertentangan, sebab prinsip yang melandasinya adalah bahwa adat Minangkabau menyatakan *alam* Minangkabau adalah perimbangan atas pertentangan antara *darek* dan *rantau*; bahwa tradisi filsafat Barat, terutama Hegelian, menyatakan *Aufhebung* lahir dari dialektika; bahwa dalam Islam, sebagaimana yang diekspresikan Muhammad Iqbal, kekhalfahan manusia lahir karena “Jika Allah ciptakan gulita, manusia membuat lentera.”

2.5. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEILMUAN ISLAM NUSANTARA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

Dalam merancang kurikulum perkuliahan di Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tantangan yang perlu dipertimbangkan adalah kekhawatiran terpinggirkannya perkuliahan-perkuliahan ilmu agama Islam yang menjadi inti dari fakultas-fakultas yang ada di IAIN. Kekhawatiran ini muncul ketika mempertimbangkan fenomena yang sedang dihadapi oleh UIN-UIN lain yang telah lebih dahulu berdiri. Di sana terjadi penurunan jumlah mahasiswa di fakultas-fakultas keagamaan dan peningkatan jumlah di fakultas dan jurusan umum.

Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa strategi peintegrasian antara ilmu agama Islam dengan ilmu umum tidak semulus yang tertulis di atas kertas. Mulus atau tidaknya peintegrasian atau dialog itu sesungguhnya ditentukan seberapa besar perubahan pandangan dan *mind-set* masyarakat secara umum dalam melihat hubungan ilmu agama dan ilmu umum.

Di titik ini, persoalan yang dihadapi sebenarnya berada di ranah sosial-budaya secara umum. Di ranah ini, hal yang tak terbantahkan lagi adalah pandangan masyarakat dan pengambil kebijakan yang menganggap ilmu pada akhirnya dicari seseorang

untuk mendapatkan pekerjaan. Bangsa Indonesia tidak perlu berkecil hati, sebab masalah ini juga dihadapi seluruh masyarakat mana pun di dunia ini. Kenyataan ini membuat universitas terjepit di antara dua sifat lembaga pendidikan, antara pendidikan akademis dengan pendidikan profesi vokasional. Universitas harus bersiasat dan membikin strategi dalam mengelola dilema ini. Di satu sisi, dia tidak bisa berkuat pada idealisme akademisnya, di sisi lain dia tidak bisa pula larut dalam tuntutan pasar tenaga kerja.

Dalam kerangka Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol bagaimana siasat itu diterjemahkan secara rinci ke dalam kurikulum ditentukan oleh penelitian dan pertimbangan mendalam di masing-masing disiplin. Prinsip yang harus dipakai dalam perancangannya harus diyakini bisa menjawab kekhawatiran tadi. Prinsip tersebut tidak boleh lepas dari keilmuan Islam Nusantara yang dikembangkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sebagaimana dijelaskan di atas. Kurikulum yang dirancang harus mencerminkan dialektika antara agen dengan bidang realitas, antara subjek dan objek. Kurikulum harus memperlihatkan dialektika keilmuan di mana posisi agen sebagai umat harus berdialektika dengan pengetahuan yang bersumber dari tradisi Islam. Posisi agen sebagai warga negara harus berdialektika dengan pengetahuan yang bersumber dari tradisi keilmuan modern, dan posisi agen sebagai warga budaya harus berdialektika dengan pengetahuan yang bersumber dari tradisi budaya. Dengan begini, wacana akademis yang berlangsung akan menyeluruh sehingga bisa melahirkan orang yang ahli (spesialis), namun mengerti duduk perkara dan hubungan keahliannya dengan wilayah keahlian lain. Seorang lulusan jurusan tafsir hadits otonom, percaya diri dan berdaulat dengan ilmunya ketika berhadapan dengan lulusan jurusan perikanan air tawar, misalnya.

Dinyatakan dengan cara lain, kurikulum ideal yang harus dirancang untuk mewujudkan keilmuan Islam Nusantara yang

diusung Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah bersifat *wide horizon; deep specialization*, yakni rancangan kurikulum yang memberikan wawasan yang luas sekaligus spesialisasi yang mendalam. Wawasan yang luas itu berarti “tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal”, sementara spesialisasi mendalam itu berarti “tahu banyak tentang sedikit hal.” *Wide horizon; deep specialization* adalah gabungan dari “tahu sedikit tentang banyak hal sekaligus tahu banyak tentang sedikit hal.”

Untuk mewujudkan hal ini, di era yang menuntut spesialisasi, tantangan yang dihadapi sangatlah berat. Kompetisi di dunia profesionalisme menuntut orang untuk fokus pada satu bidang pekerjaan. Tuntutan ini membuat orang tidak bisa mengeksplorasi wilayah-wilayah lain selain bidang spesialisasinya. Orang tidak bisa “bermain-main” dengan rasa ingin tahunya. Dalam hal tertentu, tuntutan profesionalisme di bidang spesialisasi tertentu mengakibatkan kemandegan dan kemiskinan inspirasi, sebab inspirasi kerap kali muncul dari proses eksplorasi tanpa tujuan jelas.

Di sisi lain, jika hanya bertumpu pada keluasan cakrawala pengetahuan saja akan melahirkan sosok-sosok yang cuma memiliki pengetahuan dangkal. Dalam kehidupan akademis, kecanggihan civitas akademika yang terasah lewat kurikulum yang hanya menekankan keluasan cakrawala, yang diperoleh adalah sekadar kecakapan menghubungkan-hubungkan berbagai hal, tanpa memiliki pengetahuan memadai tentang duduk perkara hal-hal yang dikaitkan. Yang dihasilkan dari kondisi ini adalah profesional yang asal-asalan.

Yang diperlukan adalah rancangan kurikulum yang menawarkan pengetahuan yang bercakrawala luas sekaligus tingkat spesialisasi mendalam. Untuk mewujudkan hal ini prinsip yang berlaku adalah bagaimana mencari perimbangan dalam dua hal bertentangan ini. Caranya adalah dengan membekali mahasiswa dengan prinsip-

prinsip yang memungkinkan mereka untuk terus berpetualang memakai rasa ingin tahunya, dan pada saat yang sama menggunakan hasil petualangan itu untuk memperdalam spesialisasinya. Apalagi yang akan berlangsung dalam sebuah petualangan kalau bukan dialog? Bukankah ada pepatah “malu bertanya sesat di jalan”? Jika seseorang tidak ingin tersesat dalam perjalanannya bertualang, dia harus bertanya, dan apa artinya pertanyaan kalau tidak terjadi dialog, tidak ada tanya-jawab.

Prinsip yang dimaksud di atas dapat disediakan dengan rancangan kurikulum yang berisi muatan-muatan yang kelak bisa dipakai mahasiswa untuk mewujudkan *wide horizon, deep specialization* tadi. Ada enam muatan yang dianggap Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dapat mewujudkan kurikulum tersebut, yang pada akhirnya akan menciptakan perimbangan dalam pertentangan yang jadi dasar keilmuan Islam Nusantara. Keenam muatan atau aspek yang perlu mewarnai kurikulum yang disusun: filsafat ilmu pengetahuan dan sejarah pemikiran, metodologi dan nilai etis, serta kritik ideologi dan konteks ekonomi-politik.

Aspek filsafat ilmu pengetahuan akan memberikan asumsi-asumsi filosofis suatu ilmu dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Asumsi ini didialektikan dengan aspek sejarah pemikiran. Jika tidak didialektikkan dengan sejarah pemikiran, maka suatu disiplin dengan segenap asumsi filosofisnya bagaikan hadir di ruang hampa tanpa mengenal asal-muasal suatu disiplin di dalam konteks ruang dan waktu. Sebaliknya aspek sejarah pemikiran yang tidak didialektikkan dengan asumsi filosofis akan menganggap keadaan suatu disiplin masa kini adalah yang termutakhir di banding sebelumnya, dan di masa yang akan datang niscaya akan lebih maju lagi tanpa menghiraukan bagaimana perubahan di level filosofis menentukan capaian-capaian suatu disiplin.

Aspek metodologi berpikir akan membekali civitas akademika yang mempelajari suatu mata kuliah dengan dasar dan cara kerja disiplin yang sedang dipelajarinya lewat mata kuliah itu. Aspek ini penting agar seseorang tidak salah kaprah dengan disiplinnya bagai orang menebang pohon dengan silet atau mengupas bawang dengan kapak. Sebaliknya, jika tidak didialektikakan dengan nilai etis, maka suatu disiplin hanya peduli dengan presisi dan kelancaran cara kerjanya demi hasil yang dituju. Sebaliknya nilai etis jika tidak didialektikan dengan aspek metodologi hanya akan menjadi pasungan yang membatasi kreativitas.

Aspek kritik ideologi yang mewarnai suatu kurikulum akan membekali civitas akademika yang tengah mempelajari suatu disiplin dengan kemampuan untuk melakukan kritik diri dari berbagai aspek. Kritik ideologi memungkinkan seseorang menyadari dan tahu apa kepentingan dan demi apa disiplin yang sedang dia pelajari lewat satu mata kuliah. Dia harus didialektikakan dengan konteks ekonomi-politik. Sebaliknya, jika konteks ekonomi-politik tidak didialektikan dengan kritik ideologi, suatu kurikulum tidak akan ada bedanya dengan buku manual (*user's manual*) untuk tujuan tertentu. Konteks ekonomi-politik yang mendasari kurikulum salah satu mata kuliah dalam studi bimbingan konseling, misalnya, dikhawatirkan hanya akan menjadi buku panduan tentang cara menundukkan anak didik bagai robot yang tak punya inisiatif.

Dialektika di wilayah kurikulum ini akan memunculkan perimbangan dalam pertentangan antara hasrat eksplorasi pengetahuan sebagai akademisi dengan keterbatasan sebagai manusia. Dialektika di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

GAMBAR 2.10. HEKSAGONAL LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



Kalau skema kurikulum di atas berlaku untuk seluruh disiplin dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang ada, maka secara khusus juga harus dipikirkan skema kurikulum untuk pengembangan keilmuan agama Islam supaya bisa bersaing dengan percaya diri dengan disiplin lain. Hal ini penting karena kepercayaan diri memerlukan dasar argumentasi yang kuat ketika harus berdialog dengan disiplin lain. Kalau argumentasi tidak kuat dalam berdialog dan kalah, maka tentu saja pihak yang kalah akan kehilangan martabat di mata orang. Wajar saja jika disiplin ilmu agama Islam ditinggalkan penonton, karena dalam argumentasi disiplin ini mengalami kekalahan dengan keilmuan umum.

Disadari sekali bahwa untuk mengatasi masalah ini diperlukan pemikiran serta waktu yang sangat banyak. Namun dapat dinyatakan di sini bahwa arah pengembangan kurikulum yang dapat menjawab masalah ini dapat bertolak dari masalah yang dihadapi masyarakat itu sendiri. Sehingga disiplin ilmu agama yang diajarkan dan dipelajari memang menemukan relevansinya dengan masalah masyarakat. Untuk mewujudkannya ke dalam kurikulum studi agama Islam di Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol, rancangan kurikulum

itu berangkat dari tiga pemilahan persoalan masyarakat secara kontekstual: di konteks lokal, nasional, dan global.

Kurikulum studi Islam dalam konteks global dirancang dengan mendialektikkan situasi global studi Islam dengan masalah yang ada sekarang, yaitu ketidakmampuan berbicara/bernegosiasi di panggung internasional. Wilayah yang harus ditambah oleh pengembangan kurikulum di level global ini adalah wilayah teoretis.

Dalam konteks nasional kurikulum studi Islam berdialektika dengan masalah ekonomi politik yang riil terjadi di tengah kehidupan sosial budaya masyarakat. Dialektika ini harus memberikan sumbangsih yang punya nilai tawar dari studi Islam untuk kemaslahatan hidup berbangsa bernegara. Jika tidak, maka masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang bersifat nasional yang ditemui dalam kasus-kasus partikular tetap akan lebih dahulu ditangani dari perspektif ilmu umum, sementara studi Islam hanya memberikan komentar atau legitimasi normatif.

Terakhir, di tingkat lokal studi Islam berdialektika dengan masalah krisis identitas dan kepanikan moral yang terjadi di tengah masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sudah saatnya studi Islam dipelajari melalui kurikulum yang tidak hanya membekali orang dengan resep normatif dan pendekatan dakwah. Penyakit masyarakat tidak lagi hanya bisa ditangani dengan larangan dan suruhan lisan lewat corong pengeras suara. Sebagai ilustrasi, bukanlah hal mustahil pengetahuan hukum Islam tentang keharaman zina bisa disampaikan kepada masyarakat lewat media seperti film dokumenter atau pementasan drama. Dialektika yang terjadi antara tiga konteks dengan tiga masalah ini hanya bisa terjadi dalam sebuah kurikulum studi Islam yang dirancang berdasarkan penelitian dan diskusi mendalam.

Dalam rangka menerjemahkan filosofi keilmuan Islam Nusantara ke dalam kurikulum perkuliahannya, Universitas Islam

Nusantara Imam Bonjol akan menghindari pendekatan cangkok mencangkok secara kuantitatif yang selama ini berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pendekatan seperti itu hanya bicara soal porsi dan persentase. Cara ini dihindari karena masalah kehidupan yang dihadapi tidak bisa diukur secara kuantitatif sehingga bisa diformulasikan ke dalam bagan presentase. Jika cara cangkok ini tetap ditempuh, yang akan terjadi tetap saja seperti hasil eksperimentasi selama ini di lembaga pendidikan Islam. Ada wilayah yang jadi unggulan karena presentasinya besar dan akhirnya mendominasi.

Dengan kata lain ingin dinyatakan bahwa mewujudkan perimbangan dalam pertentangan dalam desain kurikulum seperti diurai di atas memang sulit, namun jika keseimbangan itu tidak diupayakan, yang akan terjadi hanya dua: khaos (kekacauan) atau dominasi. Yang pertama terjadi ketika manusia membiarkan pertentangan itu apa adanya, yang kedua terjadi karena manusia terlalu bersemangat menyusun dan mengaturnya.

Bagi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol keadaan ini diperlakukan dengan arif, dicari perimbangannya, meski itu sulit. Keilmuan Islam Nusantara yang digagas adalah upaya untuk menghantarkan civitas akademiknya mengimbangi kesulitan itu agar tetap berdaulat sebagai manusia.

2.6. LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM UNGGULAN

Saat berbicara apa unggulan yang ditawarkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol, sebenarnya logika yang ada di balik pertanyaan ini adalah logika dagang. Semakin yakin orang akan keunggulan produk yang ditawarkan, semakin percaya diri dia menawarkan barangnya. Seperti yang disinggung sebelumnya, program pendidikan yang unggul di mata masyarakat secara umum adalah program yang paling menjanjikan lapangan pekerjaan. Pada

dasarnya untuk menjawab persoalan ini program pendidikan profesi dan vokasional sudah tersedia, yakni berbagai institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik dan lain sebagainya. Namun masalahnya adalah pandangan masyarakat yang seperti itu juga ditujukan bagi lembaga pendidikan akademis, tidak terkecuali Universitas Islam Negeri seperti Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol kelak. Di sini muncul ketegangan antara tuntutan untuk mempertahankan diri sebagai lembaga akademis dengan tuntutan masyarakat akan pendidikan yang menjanjikan lapangan pekerjaan.

Dalam menyikapi masalah ini, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol mencoba mendekati persoalan dengan perspektif lain. Yang dituntut masyarakat terhadap lembaga pendidikan apa pun adalah lulusannya dapat “terpakai.” Perguruan tinggi dinilai berhasil dan unggul jika alumninya terpakai dalam arti ilmu yang diperoleh dari sana bisa bermanfaat buat diri alumni dan masyarakat. Ukuran sederhana dan paling jelas yang dipakai masyarakat untuk manfaat adalah pekerjaan, sebab pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang diperoleh alumni niscaya akan memberi manfaat bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Karena pekerjaan harus ditemukan secara kreatif (menciptakan lapangan pekerjaan sendiri) maupun aktif (mencari pekerjaan dengan melamarnya), masyarakat pun cenderung memilih yang lebih instan, yakni dengan melamar, bukan menciptakan. Di titik inilah program-program studi keagamaan yang selama ini ada di IAIN dan UIN kalah cepat dalam berkompetisi, sebab dunia kerja adalah pasar. Di sini yang berlaku adalah hukum ekonomi yang paling sederhana, permintaan dan persediaan. Tak bisa diperdebatkan lagi bahwa permintaan pasar tenaga kerja lebih banyak ke tenaga-tenaga yang menguasai keterampilan dan teknik, bukan konsep-konsep.

Untuk menjawab persoalan inilah kiranya tuntutan perubahan IAIN ke UIN untuk diberi mandat yang lebih besar jadi relevan, sebab dengan mandat yang lebih besar, perguruan tinggi Islam bisa

membuka program-program studi yang menyediakan alumni yang terampil dan menguasai teknik sehingga bisa memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Akan tetapi, jika IAIN yang telah berubah jadi UIN hanya berkuat dengan cara pikir ini, maka berdasarkan hukum ekonomi yang berlaku di pasar tenaga kerja sudah bisa dipastikan alumni program keagamaan yang selama ini jadi inti keilmuan IAIN tidak akan terpakai atau hanya jadi alternatif nomor kunci, atau hanya terpakai di sektor-sektor informal. Ini berarti apa yang sudah menggejala di UIN-UIN lain di Indonesia, yakni sepiunya minat terhadap fakultas-fakultas keagamaan, bukanlah hal yang mengherankan. Apa yang terjadi sudah sesuai dengan hukum pasar tenaga kerja. Tentu akan lebih banyak kebutuhan pasar tenaga kerja terhadap guru atau dosen yang mengajarkan teknik industri ketimbang “teknik” hadits. Jadi, buat apa terkejut apalagi menganggap masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan agama dan nilai-nilai. Anggapan ini keliru besar, sebab sudah sewajarnya orang yang waras lebih dahulu memikirkan perut yang akan diisi nasi ketimbang perenungan tentang al-Farabi.

Lalu bagaimana akal Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol agar fakultas atau program-program studi ilmu keagamaan Islam tetap bisa “terpakai” di tengah masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini pertama-tama yang harus ditentukan adalah siapa atau apa saingan yang akan jadi lawan kompetisi. Selama ini yang dianggap saingan oleh program ilmu keagamaan Islam adalah program ilmu umum dan teknik. Ini adalah cara berpikir yang keliru, sebab sudah jelas akan terjadi “ketidaksambungan” seseorang meminta atlet catur bersaing dengan atlet sumo dalam pertandingan sepak bola. Yang seharusnya dijadikan saingan kompetisi adalah program ilmu keagamaan Islam yang ada. Di sinilah relevansi dan signifikansi pembicaraan tentang unggulan sebuah Universitas Islam.

Kekeliruan cara pikir ini terjadi tentu bukan secara sengaja dan sadar. Kalau secara sengaja dan sadar, mana mungkin para ahli dan pemikir IAIN dan UIN di Indonesia bisa memakai cara berpikir yang tidak logis seperti tadi, yakni tidak mengenali ketidaksebandingan dua hal (*incompatibility*). Salah satu penyebabnya adalah faktor psikologis yang sudah ditengarai oleh Muzaffar Iqbal, yakni faktor psikologis. Ada keminderan untuk bersaing yang kemudian melahirkan kepanikan karena harus segera menyediakan segala sesuatu untuk terjun ke dunia persaingan.

Orang panik cenderung tidak bisa berpikir tenang dan akan bergegas memanfaatkan apa yang tersedia. Kepanikan dan ketergesaan para civitas akademika IAIN yang harus menyesuaikan diri dengan paradigma universitas mendorongnya langsung mengambil dan mencontoh apa yang telah ada. Inilah yang menjelaskan mengapa rancangan program unggulan yang akan dibuat di dalam UIN adalah cangkokan atau replika dari program yang sudah mapan di perguruan tinggi umum. Seakan-akan sudah tidak ada waktu lagi untuk merenungkan apa program unggulan selain memberi predikat Islam kepada program yang sudah dinilai masyarakat sebagai unggul dalam menghasilkan tenaga kerja.

Yang akan dilakukan oleh Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dalam menyikapi kekhawatiran akan tergusurnya fakultas dan program studi keagamaan Islam adalah *pertama-tama* dengan memetakan kekuatan dan kelemahan lawan. *Kedua*, mengembangkan kekuatan dan potensi yang selama ini sudah ada dengan menyesuaikan tuntutan yang ada di level akademis, bukan di level masyarakat pada umumnya yang sudah jelas berada di wilayah pasar tenaga kerja. Kedua hal ini hanya bisa dikembangkan jika di dalam civitas akademika IAIN Imam Bonjol yang akan berubah jadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol ada kepercayaan diri. Hanya orang yang percaya diri yang mampu bersaing dalam pengertian sebenarnya.

Dalam konteks program-program studi ilmu keagamaan Islam, selama ini di IAIN Imam Bonjol sudah diwakili lima fakultas dan satu program pascasarjana: Syariah, Ushuluddin, Adab, Tarbiyah dan Dakwah. Pertanyaannya adalah apa atau siapa saingan kelima fakultas ini? Yang jadi saingan untuk lawan berkompetisi dan berdialog adalah program-program studi ilmu keagamaan Islam lain, baik yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Saingannya bukan program studi ilmu umum dan teknik!

Jika persoalan sudah didudukkan seperti ini, barulah peta tentang kekuatan dan kelemahan lawan bisa dibaca berdasarkan kekuatan dan kelemahan sendiri. Pemetaan terperinci tentang kekuatan dan kelemahan saingan ini diakui harus diperoleh melalui penelitian dan pendalaman yang memadai. Namun pemetaan itu setidaknya bisa diperkirakan akan berkisar di dua hal terpenting, yakni: *pertama*, perspektif baru apa yang ditawarkan untuk menutupi kelemahan sendiri dan menyaingi kelebihan lawan; *kedua*, *output* atau hasil apa yang akan ditawarkan sebagai kekuatan dan dijadikan tumpuan tawar-menawar dalam persaingan pengaruh di tengah komunitas akademis secara khusus, dan di tengah masyarakat secara umum.

Saingan kajian ilmu-ilmu keagamaan Islam saat ini, terutama di luar negeri, sudah sangat maju karena berhasil mengawinkan kajian tradisional yang sudah berusia berabad-abad dengan perspektif dan temuan-temuan teoretis baru ilmu-ilmu humaniora kontemporer. Ilmu keagamaan Islam yang harus dikembangkan di Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol bukan dengan cara meniru kemajuan yang sudah dicapai di tempat lain, sebab jika ini yang dilakukan, maka kemajuan hasil peniruan ini tidak akan tersambung secara kontekstual dengan kebutuhan lingkungan akademis dan masyarakat. Inilah yang terjadi, misalnya, dengan para lulusan luar negeri yang membawa begitu saja “kemajuan studi Islam” di sana ke

tempat nya mengajar. Ketika disampaikan ke lingkungan akademis tempat asalnya, kemajuan itu seakan tidak sambung dengan konteks. Parahnya lagi, para lulusan itu menganggap konteks tempat dia berkarya sebagai akademisi ketinggalan dan keras kepala tidak mau maju.

Berdasarkan latar persoalan di atas, maka Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol **tetap akan mengedapankan kajian Islam yang selama ini berada di bawah lima fakultas dan satu program pascasarjana**. Kajian Islam yang ada di sini akan dijadikan salah satu program unggulan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dengan cara memberikan perspektif baru guna menghasilkan output yang memang tersambung dengan konteks dan kebutuhan lingkungan akademis dan masyarakat terkait ilmu keagamaan Islam. Langkah ini adalah awal bagi pengembangan lebih luas, sehingga dalam kurun waktu tertentu harus dievaluasi dan direvisi.

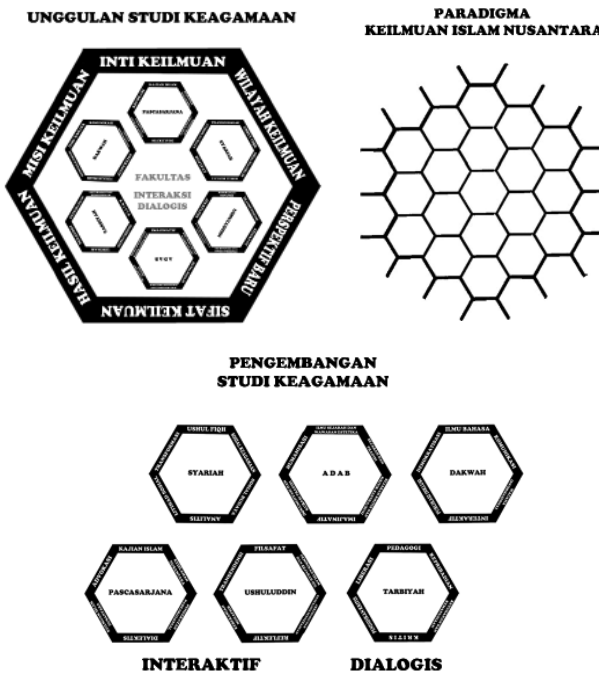
Kajian Islam yang selama ini sudah mentradisi di IAIN Imam Bonjol tetap dan harus diunggulkan. Caranya adalah dengan memberikan perspektif baru dan menjanjikan output yang khas dan otentik. Dengan cara ini Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol meniatkan dirinya sebagai **sebuah laboratorium sosial**. Di sini istilah laboratorium tidak diartikan berdasarkan paradigma ilmu alam atau ilmu sosial yang positivistik, melainkan dalam pengertian humaniora klasik, yakni sebagai wadah tempat civitas akademika “magang.” Di tempat magang, seorang anak magang akan berdialog secara terbuka dengan induk semangnya, sementara induk semang mendidik anak magang justru dengan menyuruh bekerja dan berkarya, bukan menghupal.

Sebagai sebuah laboratorium sosial, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol akan menjadi wadah tempat civitas akademika mendialogkan dirinya dengan masyarakat, dan begitu pula sebaliknya, masyarakat dapat merefleksikan diri berdasarkan

capaian-capaian akademis dan teoretis yang dihasilkan civitas akademika. Di sinilah terjadi dialektika yang menghasilkan pertimbangan antara pertimbangan-pertentangan yang ada, baik itu pertimbangan antara civitas akademika yang dituduh selalu melangit dengan masyarakat awam yang dituduh hanya peduli soal remeh temeh sehari-hari, maupun pertimbangan antara gagasan-gagasan yang ada di tengah masyarakat itu sendiri.

Skema kajian Islam unggulan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tersebut dapat dilihat dalam heksagonal berikut ini.

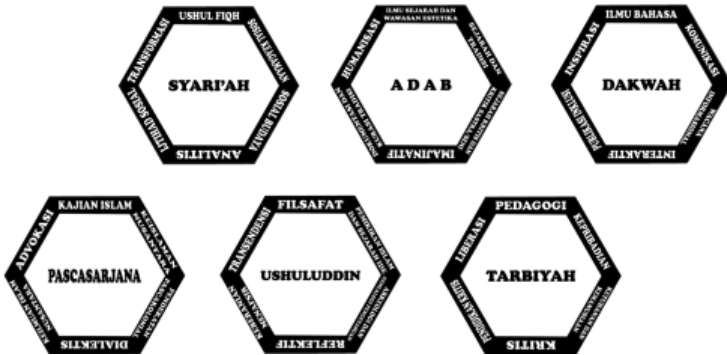
GAMBAR 2.11. HEKSAGONAL UNGGULAN STUDI KEAGAMAAN



GAMBAR 2.12. HEKSAGONAL UNGGULAN STUDI KEAGAMAAN



GAMBAR 2.13. HEKSAGONAL PENGEMBANGAN STUDI KEAGAMAAN



Tabel 2.1
Penjelasan Heksagonal Unggulan Keagamaan

FAKULTAS	INTI KEILMUAN	WILAYAH KEILMUAN	PERSPEKTIF KEILMUAN	SIFAT KEILMUAN	HASIL KEILMUAN	MISI KEILMUAN
Syari'ah	Ushul Fiqh	Sosial Keagamaan	Sosial Budaya	Analitis	Ijtihad Sosial	Transformasi
Ushuluddin	Filsafat	Pemikiran Islam dan Sejarah Ide	Arkeologi dan Genealogi Pengetahuan	Reflektif	Keberanian Menafsir	Transendensi
Adab	Ilmu Sejarah dan Wawasan Estetika	Sejarah dan Tradisi	Sejarah Kritis dan Kritik Sastra/Kritik Performativitas	Imajinatif	Dokumentasi dan Kurasi Tradisi	Humanisasi
Tarbiyah	Pedagogi	Kepribadian	Ketuhanan dan Kemanusiaan	Kritis	Pendidikan Kritis	Liberasi
Dakwah	Ilmu Bahasa	Komunikasi	Wacana Informasional	Interaktif	Publikasi Inklusif	Inspirasi
Pascasarjana	Kajian Islam	Keislaman Nusantara	Pendekatan Pascakolonial	Dialektis	Keilmuan Islam Nusantara	Advokasi

2.6.1. Fakultas Syariah

Semenjak berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia, Fakultas Syariah dengan segenap jurusan dan program studinya, dipandang identik dengan wilayah keilmuan hukum Islam. Namun jika menilik pengertian kata syariah itu sendiri maupun kajian-kajian yang selama ini sudah dikembangkan di Fakultas Syariah, sesungguhnya bidang realitas yang ditangani oleh segenap disiplin ilmu yang dinaungi Fakultas Syariah adalah realitas sosial keagamaan. Dengan demikian, inti keilmuan yang jadi jantung Fakultas Syariah bukanlah hukum Islam atau hukum secara umum, melainkan ushul fiqh. Sebab dengan ilmu inilah seorang muslim atau mujtahid mendialektikkan substansi yang tersirat dalam kitabullah dengan realitas kehidupan manusia. Kemahiran di bidang ushul fiqh sebagai sebuah metode berpikir—bukan sebagai disiplin ilmu agama Islam sebagaimana yang telah dikenal selama ini—menentukan mutu respon dan apresiasi civitas akademika Fakultas Syariah terhadap realitas sosial-keagamaan.

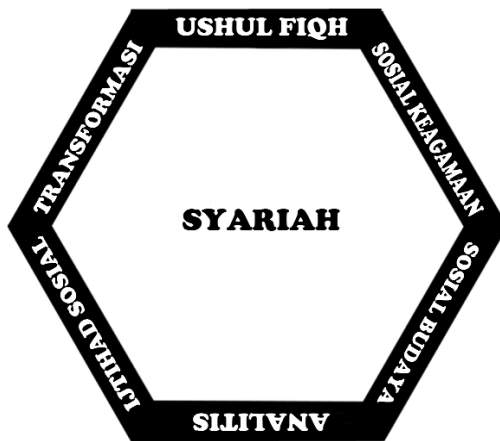
Keunggulan Fakultas Syariah, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol terletak pada perspektif baru dan output keilmuan studi Islam yang akan dihasilkannya. Perspektif baru itu adalah sosial-budaya dalam pengertian luas yang mencakup persoalan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Inti keilmuan Fakultas Syariah yang membidangi realitas sosial keagamaan akan memakai perspektif yang bertolak dari kenyataan sosial-budaya ini. Maka apa pun pengembangan yang dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol akan menitikberatkan pada perspektif ini, sehingga kajian-kajian yang dikembangkan bukan lagi melulu pada tema-tema tradisional sebagaimana yang selama ini telah dilakukan.

Jika hal ini tidak dilakukan maka lambat laun Fakultas Syariah secara keilmuan akan disaingi oleh program-program studi ilmu

umum yang membahas masyarakat Islam sebagai subjek kajiannya. Sebagai contoh, Jurusan Akhwalus Syakhsiah yang masih hanya berkuat dengan kitab-kitab fiqh pasti akan tersaingi secara keilmuan oleh sosiolog yang meneliti kehidupan sosial-keagamaan masyarakat muslim secara mendalam.

Output keilmuan yang diharapkan lahir dari Fakultas Syariah dengan perspektif baru ini adalah ijtihad sosial. Keterampilan istinbath hukum Islam dalam perspektif keilmuan syariah secara tradisional ketika diberi perspektif baru harus melahirkan bukan hanya hukum Islam untuk fenomena dan fakta hukum baru, melainkan lebih luas lagi. Keilmuan syariah di Fakultas Syariah harus mendorong civitas akademiknya melakukan ijtihad sosial untuk menyelesaikan segenap masalah sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat muslim yang jadi latar Fakultas Syariah Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol.

GAMBAR 2.14. HEKSAGONAL KEILMUAN SYARIAH



2.6.2. Fakultas Ushuluddin

Fakultas Ushuluddin di perguruan tinggi agama Islam Indonesia adalah fakultas dengan inti keilmuan yang agak membingungkan. Fakultas ini umumnya terdiri dari tiga jurusan, Aqidah/Filsafat, Tafsir-Hadits dan Perbandingan Agama. Belakangan ada beberapa IAIN yang memasukkan Jurusan Psikologi ke fakultas ini. Di Jurusan Aqidah/Filsafat terjadi tumpang tindih disiplin keilmuan antara ilmu kalam (teologi Islam) dengan filsafat murni, di wilayah tafsir-hadits terjadi tumpang tindih keilmuan antara keilmuan syariah dengan ilmu tafsir atau ilmu hadits itu sendiri, sementara di jurusan perbandingan agama yang jadi masalah adalah ketidakjelasan paradigma keilmuan jurusan ini apakah ke antropologi atau sosiologi agama atautkah ke teologi perbandingan. Barangkali inilah yang membuat Fakultas Ushuluddin adalah fakultas yang paling merana di antara fakultas lain, sebab inti keilmuannya tidak memungkinkan komunitas akademis maupun masyarakat bisa langsung mengidentifikasi subjek keilmuan civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa).

Oleh karena itu, supaya fakultas ini tidak lagi merana dan mendapat apresiasi sebelah mata oleh komunitas akademik di bidang studi Islam serta masyarakat umum, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol akan menegaskan filsafat sebagai inti keilmuan Fakultas Ushuluddin. Ada pun yang jadi wilayah keilmuan yang jadi lahan fakultas ini adalah pemikiran Islam dan sejarah ide sebagaimana yang terdokumentasi tradisi pemikiran, apakah itu teks ilmiah maupun teks sastra, baik secara tulisan maupun lisan.

Perspektif baru yang ditawarkan sehingga memungkinkan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol percaya diri bersaing dengan program studi yang juga menjadikan filsafat dan wilayah pemikiran Islam sebagai bidangnya adalah perspektif arkeologi dan genealogi pengetahuan. Perspektif ini

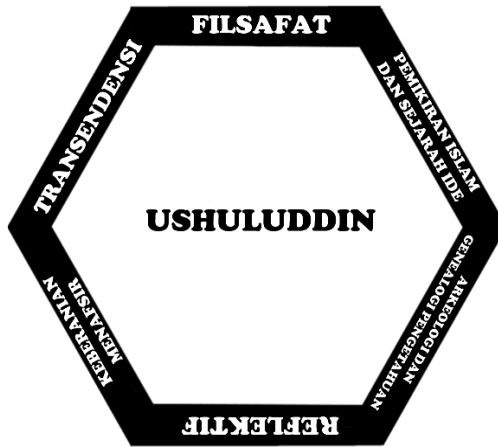
adalah langkah awal dalam rangka mendudukkan kembali pemikiran Islam yang sampai ke masyarakat Minangkabau/Sumatera Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya, agar kontekstual. Kontekstual di sini dalam arti bahwa perkembangan dan kemajuan suatu gagasan baru dinilai, dipelajari, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan karena dia merupakan versi terbaru atau termaju dari sebuah pemikiran. Satu-satunya jalan untuk melacak perkembangan dan kemajuan suatu gagasan secara kritis adalah dengan menggali lapisan-lapisan sejarah yang menutupi suatu pemikiran dan gagasan.

Dalam proses penggalian itu, di setiap lapisan zaman akan ditemukan jejaring hubungan suatu gagasan dengan dinamika historis di suatu zaman, apakah itu dengan dimensi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan kesenian. Kelebihan pendekatan arkeologi dan genealogi pengetahuan adalah ide dan gagasan pemikiran dilihat dengan jejaringnya secara struktural dengan dimensi-dimensi tersebut. Inilah yang membuat perspektif arkeologi dan genealogi pengetahuan ini jadi relevan bagi kajian pemikiran dan filsafat di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol yang ingin mengontekstualkan suatu ide dan gagasan pemikiran sesuai dengan kebutuhan Keislaman Nusantara.

Ada pun *output* yang diharapkan akan dihasilkan oleh Fakultas Ushuluddin dengan mengunggulkan filsafat dengan perspektif arkeologi dan genealogi pengetahuan adalah keberanian menafsir. Untuk apa orang mempelajari ide dan gagasan pemikiran jika hanya untuk memperteguh ide dan gagasan yang telah ada itu. Untuk apa dia dipelajari jika tidak untuk dikritisi dan membuatnya relevan dengan kebutuhan yang ada. Untuk melakukan hal ini yang diperlukan adalah keberanian menafsir, sebab kritik tidak mungkin lahir jika tafsiran yang muncul tidak luas dan dalam. Sudah saatnya civitas akademika Fakultas Ushuluddin, maupun cendekiawan

muslim, untuk tidak lagi memperdebatkan soal kebebasan berpikir versus ketaatan, sekularisme versus nilai-nilai sakral. Masih banyak hal yang harus direnungkan dan dipikirkan ketimbang dosa dan pahala gara-gara berpikir, sebab hal yang akan dijadikan guru tempat belajar berkembang seluas alam.

GAMBAR 2.15. HEKSAGONAL KEILMUAN USHULUDDIN



2.6.3. Fakultas Adab

Wilayah keilmuan yang bisa dieksplorasi oleh Fakultas Adab sesungguhnya lebih luas dari fakultas lain, termasuk Fakultas Ushuluddin. Yang jadi cakupannya adalah peradaban, terutama peradaban Islam. Di wilayah ini yang tersedia adalah hasil konkret dari pembudayaan manusia muslim atas karunia akal-budi, rasa-rasa, dan hati-nuraninya. Wujud konkret pembudayaan itu dapat ditemukan dalam apa yang disebut artefak kebudayaan atau jejak tradisi yang *tangible* maupun *intangible*. Pada tinggalan-tinggalan tradisi itu tak dapat dipisahkan secara ketat apakah pemikiran hasil akal-budi daya, wawasan tentang keindahan hasil pengolahan rasa-rasa, atau hikmah-hikmah hasil pengasahan hati-nurani. Sungguh wilayah yang sangat luas dan kaya.

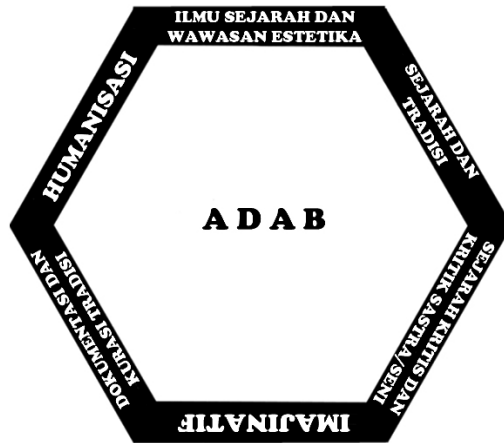
Lalu mengapa keluasan dan kekayaan ini tidak terasa gaungnya di Fakultas Adab selama ini? Sebabnya adalah terjadi pereduksian atas makna kebudayaan dan tradisi dalam pengertian di atas kepada ilmu sejarah yang berkuat pada wacana informasional (*who, what, when, why, where, dan how* di Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, kepada wawasan estetika klasik Sastra dan Bahasa Arab yang bukannya memanjakan imajinasi akibat keindahan sastra, melainkan mendorong terjadinya Arabisasi lidah dan budaya lokal, kepada wawasan teknis perpustakaan sebagai pustakawan, bukan pada etos dokumenter seorang bibliografer.

Cara agar civitas akademika Fakultas Adab dapat kembali mengenali dan menyadari keluasan dan kekayaan yang tersimpan di wilayah keilmuannya adalah dengan mengusung lagi inti keilmuannya, yakni ilmu sejarah dan wawasan estetika dengan memberinya perspektif baru, yaitu sejarah kritis dan kritik sastra/kritik seni. Perspektif sejarah kritis memosisikan tujuan disiplin sejarah bukan untuk mendokumentasi dan mereproduksi wacana informasi (soal siapa, apa, mengapa, kapan dan bagaimana) tentang masa lalu, melainkan memproduksi gagasan kreatif dan imajinatif berdasarkan inspirasi dari masa lalu. Sementara wawasan estetika adalah disiplin yang memperlakukan karya seni maupun sastra sebagai ladang kreativitas imajinasi, bukan sebagai teks normatif yang dingin. Karya sastra dan karya seni pada umumnya adalah teks memberikan kenikmatan pada imajinasi dan memancing kreativitas, bukan teks hukum yang membatasi kebebasan.

Output yang diharapkan lewat perspektif baru ini adalah dokumentasi dan wacana kuratorial terhadap turats Islam, terutama Islam Nusantara. Dokumentasi tentu berangkat dari disiplin sejarah yang bertumpu pada wacana informasional, namun tidak hanya berhenti di sini, sebab dokumentasi hanya akan menjadi tumpukan informasi yang beku jika tidak diolah dengan visi kreatif. Wacana

kuratorial adalah wacana yang memperkenalkan kepada khalayak umum tentang apa dan bagaimana suatu peristiwa sejarah maupun suatu karya dengan bahasa yang mereka mengerti. Dengan demikian, Fakultas Adab bukan ingin mencetak pelaku sejarah dan sastrawan/seniman, melainkan sejarawan dan kritikus.

GAMBAR 2.16. HEKSAGONAL KEILMUAN ADAB



2.6.4. Fakultas Tarbiyah

Fakultas perguruan tinggi Islam yang paling diminati masyarakat adalah Tarbiyah. Alasannya sederhana dan realistis, fakultas ini yang menjanjikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kualifikasi profesi seorang guru. Pandangan masyarakat ini telah membuat Fakultas Tarbiyah sebagai fakultas yang mengembangkan keilmuan untuk menunjang profesi seorang guru.

Konsekuensi dari hal ini adalah Fakultas Tarbiyah harus membidik profesi keguruan yang spesifik, yaitu guru agama Islam, karena untuk guru bidang keilmuan lain sudah lebih dahulu dialami oleh perguruan tinggi umum. Akibat lanjutannya adalah terjadinya reduksi akan arti tarbiyah itu sendiri menjadi sekadar pelatihan guru profesional. Dengan kata lain, spirit pedagogis yang

berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi terkesampingkan demi mengejar persaingan profesi guru.

Sudah saatnya keadaan ini diubah karena lama kelamaan Fakultas Tarbiyah yang hanya fokus pada penyiapan tenaga pengajar akan dikalahkan oleh perguruan tinggi umum yang juga akan membaca kebutuhan pasar tenaga kerja untuk agama Islam. Bukan tidak mungkin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Umum akan membuka Jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam hal penyiapan tenaga pendidik, tentu perguruan tinggi umum ini sudah lebih maju.

Cara mengubahnya adalah pertama-tama dengan kembali kepada keilmuan inti Fakultas Tarbiyah yang tak lain adalah pedagogi. Pedagogi adalah istilah yang berasal dari tradisi Yunani kuno dan merujuk pada praktik bimbingan yang dilakukan orang dewasa (orang tua atau yang mewakilinya) untuk membimbing anak-anak agar punya pengetahuan dan keterampilan menempuh kedewasaan. Istilah *tarbiyah* dalam kosa kata Arab memang merujuk pada pengertian dasar pedagogi ini. Ini berarti bahwa yang jadi tujuan utama Fakultas Tarbiyah bukan menghasilkan tenaga pendidik profesional yang siap dipekerjakan dan digaji oleh lembaga pendidikan, melainkan mengajarkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan keterampilan dalam membimbing anak-anak menuju kedewasaan sehingga mereka jadi manusia yang matang menghadapi seluk-beluk kehidupan orang dewasa. Jadi tidak peduli apakah lulusan Fakultas Tarbiyah jadi guru atau tukang becak, jadi pengajar di sekolah internasional atau hanya ibu rumah tangga, yang penting ilmu yang diberikan layak dan cocok buatnya dalam membimbing anak-anak memasuki gerbang kedewasaan.

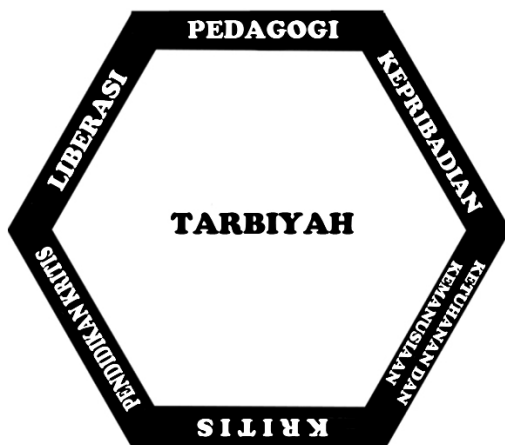
Oleh karena itu wilayah keilmuan Fakultas Tarbiyah sesungguhnya adalah moralitas dan etos. Singkat kata, wilayahnya adalah kepribadian. Bagaimana membimbing dan membudidayakan

bibit kepribadian di dalam diri agar seorang anak bisa tumbuh dan membuahkannya moralitas dan etos yang bisa dipetik oleh manusia lain. Secara normatif, seluruh wacana pendidikan dengan beragam ideologi yang melandasinya sudah tentu bertujuan seperti ini. Namun persoalannya adalah perspektif apa yang akan ditawarkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol untuk membedakannya dari lembaga pendidikan kependidikan dan keguruan lain? Jawabannya adalah perspektif ketuhanan dan kemanusiaan.

Perspektif ini adalah terjemahan dari filosofi perimbangan dalam pertentangan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dalam memandang manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang Mahakuasa, namun manusia juga merupakan pencipta lewat kuasa kreatifnya. Manusia jadi sempurna (*kamil*) saat mendialektikkan potensi kreatifnya dengan keterbatasan alamiah yang juga diciptakan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan gelap malam, manusia merancang lentera. Keduanya tidak sedang bersaing, akan tetapi sedang mewujudkan cinta masing-masing. Tuhan ciptakan malam karena cintanya pada manusia dengan memberi jalan agar mereka memanfaatkan akal dan rasa, sementara manusia merancang lentera karena ingin menunjukkan cinta pada Tuhan dengan cara bersyukur memanfaatkan potensi yang telah diberikan. Perspektif baru bagi Fakultas Tarbiyah yang akan membuatnya unggul adalah prinsip dialektis antara ketakterbatasan dengan keterbatasan. Output dari rancangan Fakultas Tarbiyah seperti ini adalah pedagogi kritis.

Bukankah pedagogi kritis yang dicanangkan para pemikir seperti Paolo Freire dan Henry Giroux pada dasarnya adalah pendidikan yang mengajarkan dialektika ketakterbatasan potensi akal dan imajinasi manusia dengan batasan-batasan yang diakibatkan oleh dominasi dan koersi kekuasaan? Pendidikan kritis Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah pendidikan kritis yang membimbing manusia untuk mendialektikkan ketakterbatasan akal dan imajinasi dengan keterbatasan.

GAMBAR 2.17. HEKSAGONAL KEILMUAN TARBIYAH



2.6.5. Fakultas Dakwah

Fakultas Dakwah adalah salah satu dari dua fakultas yang jadi ikon perguruan tinggi agama Islam dalam pandangan masyarakat umum. Masyarakat memandang keahlian yang diajarkan perguruan tinggi Islam kalau tidak untuk mengurus hukum Islam (terutama soal kawin cerai atau sengketa perdata), maka untuk menceramahi orang Muslim lain. Yang pertama ikonnya adalah Fakultas Syariah, sementara yang kedua adalah Fakultas Dakwah.

Untuk kasus yang kedua, sudah banyak terobosan yang ditempuh untuk menggeser pandangan tersebut, karena pandangan itu mereduksi dakwah menjadi sekadar pertunjukan (*performance*) di atas mimbar dan lama kelamaan menghasilkan kesan otoritas keagamaan yang terinstitusionalisasi pada sosok personal.

Terlepas dari terobosan yang telah dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur baru seperti manajemen atau bimbingan konseling, namun yang sesungguhnya perlu dicatat adalah bahwa esensi dakwah dalam Islam adalah transformasi nilai-nilai, bukan kampanye nilai-nilai. Transformasi nilai bisa terjadi jika proses

transmisi nilai berlangsung dengan baik dan kontekstual. Fungsi dakwah adalah jadi medium transmisi ini.

Dari sudut ini, maka yang sesungguhnya jadi inti keilmuan Fakultas Dakwah adalah bahasa dan wilayah keilmuannya adalah komunikasi. Karena fungsinya sebagai medium, dakwah bisa melalui bentuk komunikasi yang beragam selama memenuhi unsur-unsur komunikatif yang akan mentransmisikan nilai-nilai. Komunikasi apa pun, selama masih bertumpu pada pesan dan makna, maka tidak akan bisa lepas dari ilmu bahasa. Itulah mengapa yang jadi inti di Fakultas Dakwah bukan penguasaan norma dan doktrin, melainkan ilmu bahasa sebagai bahasan dasar untuk mengomunikasikan nilai-nilai normatif dan doktriner agar tertransmisikan (tersebar) dengan optimal.

Perspektif baru yang akan membuat Fakultas Dakwah Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol unggul adalah dakwah yang berangkat dari wacana informasional, bukan wacana pedagogis, dakwah yang berangkat dari *i'lan* (kata bahasa Arab yang jadi dasar kata “iklan”) bukan dakwah yang berangkat dari kata *da'wah* (kata bahasa Arab yang berarti seruan/ajakan), dakwah yang memberitahu, bukan yang mendikte.

Mengapa sisi ini yang diunggulkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol? Sebabnya adalah kesadaran penuh Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol akan fakta bahwa Islam itu tidak tunggal, bahwa Indonesia itu majemuk, dan masyarakat muslim di mana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol bertempat adalah masyarakat yang hidup di sebuah negara kesatuan yang demokratis. Oleh karena itu yang diperlukan adalah dakwah yang memberikan informasi seluas-luas dan sedalam-dalamnya tentang nilai-nilai keislaman yang kemudian dapat dipilih oleh jamaah/audien di antara pilihan nilai yang tersedia di tengah kehidupan demokratis.

Dari cara berpikir seperti ini, output yang akan dihasilkan adalah dakwah yang berwujud publikasi inklusif. Suatu dakwah yang tak lagi mendikte, yang memosisikan hal yang didakwahkan sebagai satu-satunya yang benar dan wajib diterima, melainkan tawaran pilihan berdasarkan argumentasi rasional.

GAMBAR 2.18. HEKSAGONAL KEILMUAN DAKWAH



2.6.6. Program Pascasarjana

Hal yang perlu dibicarakan terkait program pascasarjana perguruan tinggi agama Islam baik yang negeri maupun swasta di Indonesia adalah hubungannya dengan program sarjana. Apakah hubungannya kontinuitas reproduktif dalam arti program pascasarjana adalah wadah untuk lebih mendalami ilmu yang diperoleh di masing-masing program sarjana ataukah hubungan diskontinuitas kreatif dalam arti program pascasarjana tidak lagi mengulang pembahasan yang telah diberikan di tingkat sarjana walau dengan bobot dan kedalaman berbeda, melainkan membahas dan mendalami dimensi keilmuan agama Islam yang lebih mendasar, apakah itu berupa paradigma, metodologi berpikir, riset dan pengembangan dan lain sebagainya.

Masalah ini perlu diperhatikan karena ada kecenderungan program pascasarjana cuma kelanjutan dari program sarjana.

Kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah mahasiswa yang lulus sarjana tidak mampu mendalami sendiri disiplin yang dipilihnya berdasarkan matakuliah yang telah diperolehnya selama perkuliahan sehingga masih perlu “dibimbing” dalam program pascasarjana. Mengapa di konsentrasi hukum Islam atau pendidikan Islam di program pascasarjana pembahasan sama saja dengan yang telah dikunyah-kunyah di tingkat sarjana, bahkan dengan materi dan tenaga pengajar yang persis sama? Kalau program pascasarjana mengandaikan adanya pengembangan, pertanyaannya adalah pengembangan yang bagaimana dan ke arah mana?

Keadaan inilah yang membuat program pascasarjana seakan mengalami disorientasi dan kondisi ini ditanggulangi dengan bersigegas memakai orientasi yang dikembangkan orang lain. Orang mengembangkan pascasarjana dengan orientasi pluralisme atau multikulturalisme, orientasi ini pun langsung dijiplak, begitu pula dengan orientasi-orientasi lain seperti kewirausahaan (*entrepreneurship*), kesejahteraan sosial (*social work*), dan lain sebagainya.

Sesungguhnya orientasi program pascasarjana mana pun, tidak hanya pascasarjana perguruan tinggi Islam, harus diarahkan pada pematangan intelektual sehingga bisa menghasilkan buah-buah kebajikan ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Syarat yang memungkinkan orientasi ini bisa ditempuh adalah bahwa proses pendewasaan intelektual kurang lebih telah berlangsung baik di tingkat sarjana. Oleh karena itu, inti etos akademik di tingkat sarjana adalah kemandirian intelektual, sebagaimana layaknya seseorang yang memasuki masa kedewasaan bisa mandiri. Sedangkan inti etos akademik di tingkat pascasarjana adalah produktivitas intelektual, sebagaimana layaknya seseorang yang telah benar-benar dewasa akhirnya bisa dan harus produktif dalam arti seluas-luasnya.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol akan menyiasati hal ini dengan mengorientasikan program pascasarjananya supaya produktif, bukan lagi memosisikan diri sebagai wadah tempat pendewasaan intelektual. Siasat ini bisa dilaksanakan pertama-tama jika berangkat dari apa yang jadi inti keilmuan yang jadi fokus.

Inti keilmuan tersebut adalah Kajian Islam (*Islamic Studies*) itu sendiri. Ini berarti bahwa di tingkat pascasarjana, keilmuan Islam tidak lagi dipandang terpilah dan tersekat antara fiqh, kalam, tafsir-hadits, bahasa Arab, sejarah Islam, retorika dakwah, pendidikan akhlak, dan lain sebagainya. Islam dan keislaman dipandang dan diposisikan secara holistik.

Siasat itu akan gagal jika berhenti pada pemosisian Kajian Islam yang sangat luas dan umum itu sebagai wilayah kajian. Jika ini yang terjadi, maka benih spesialisasi yang telah terbentuk di tingkat sarjana akan mentah dan kabur lagi sesampainya seorang mahasiswa di pascasarjana. Oleh karena itulah pascasarjana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memosisikan Kajian Islam sebagai inti keilmuan, bukan wilayah keilmuan. Ada pun yang akan jadi wilayah keilmuannya adalah Keislaman Nusantara, apakah itu pemikiran keislaman sebagaimana yang lahir dan/atau berkembang di Nusantara maupun peristiwa sosial-budaya keislaman yang secara historis terjadi di Nusantara. Dengan begini, kedewasaan intelektual seorang mahasiswa di bidang ilmu tafsir semasa dia di tingkat sarjana akan dikembangkan lebih lanjut sehingga keilmuan itu membuahkan hasil yang kontekstual dengan persoalan tafsir di Nusantara. Agar dua contoh seiring, bisa pula dimisalkan dengan bidang pendidikan. Keilmuan tarbiyah atau pedagogi yang telah dewasa di masa perkuliahan tingkat sarjana akan dimatangkan buahnya di tingkat pascasarjana dengan keilmuan tarbiyah yang tersambung dengan problematika pendidikan Islam di Nusantara.

Syarat mutlak agar hal ini bisa dilakukan adalah adanya kemajemukan perspektif keilmuan, baik asumsi dasar, kerangka teoretis, pendekatan dan metodologi, yang diberikan kepada mahasiswa pascasarjana. Akan tetapi kemajemukan itu jika dikelola tanpa kerangka berpikir yang jelas, maka yang terjadi adalah *chaos* yang wujud konkretnya di dunia akademis adalah debat kusir tanpa kuda! Kerangka berpikir itu bagi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol, sekali lagi, tak lain tak bukan adalah dialektika: perimbangan dalam pertentangan. Wujud kerangka berpikir itu di program pascasarjana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sekaligus menjadi perspektif baru yang akan membuatnya layak diunggulkan. Wujud perspektif baru itu adalah pendekatan pascakolonial.

Pendekatan pascakolonial sesungguhnya adalah pengembangan dari kerangka dasar pemikiran Edward Said yang mempersoalkan hubungan “barat” dan “timur”. Yang pertama menyimbolkan kemajuan, kekuasaan, kekayaan, kecerdasan, dan sebagainya; yang kedua melambangkan hal sebaliknya. Hubungan timpang keduanya bermula saat terjadi persentuhan kebudayaan “timur” dengan “barat” dalam konteks kolonialisme. Dalam rangka penjajahan, “barat” secara sepihak merepresentasikan “timur” ke dalam wacana orientalisme demi kepentingannya. Perepresentasian ini sudah barang tentu timpang dan tak adil karena sepihak dan berudang di balik batu.

Dampak yang dialami kebudayaan dan masyarakat “timur”, di mana Islam dan masyarakat muslim adalah salah satu bagian terpenting dan terbesar di dalamnya, adalah kemiskinan dan ambivalensi. Kemiskinan bisa dilihat dari segenap sektor kehidupan bermasyarakat, mulai dari kehidupan intelektual dan ekonomi sampai soal bagaimana mencuci tangan atau menggosok gigi yang benar. Sementara ambivalensi dapat dilihat dalam keraguan dan kemenduaan sikap antara mau jadi seperti “barat” namun pada saat bersamaan ingin tetap jadi “timur.”

Wacana kolonial seperti ini tetap diidap oleh masyarakat “timur” meski mereka sudah memerdekakan diri dari penjajahan dan menjadi negara-bangsa. Ketika masyarakat “timur” ingin mengelola diri secara mandiri, kemiskinan itu masih jadi momok dan ambivalensi sikap, tetap menjadi sandungan untuk menentukan pilihan. Dari kondisi ini ada yang memasang niat ekstrem, misalnya, dengan menutup diri dari segala hal yang berbau “barat”, namun tetap saja ambivalen. Meneriakkan penolakan atas demokrasi karena bikinan orang “barat” dengan memakai fasilitas google bikinan warga Amerika tulen. Ada pula yang memasang niat ekstrem sebaliknya dengan meniatkan diri untuk jadi “barat” sepenuh dan seutuhnya. Mendorong wacana kesetaraan gender sebagaimana yang berlaku di “barat” di tempat kerja sembari tetap marah dan jengkel jika sang istri tidak sempat menyetrifikasi baju pergi ke kantor.

Apakah kemiskinan dan ambivalensi ini berlaku di dunia akademis masyarakat “timur” pascakolonial, saat era penjajahan sudah selesai? Persis di dunia akademis inilah representasi sepihak “barat” atas “timur” itu berlangsung secara subtil namun paling telak. Wilayah inilah yang jadi pembahasan Edward Said dalam buku *Orientalism*. Tumpukan dokumentasi keilmuan yang dihasilkan oleh ahli-ahli ketimuran dan keislaman membuat “barat” percaya diri sekali dan memandang dirinya lebih tahu tentang “timur” ketimbang orang “timur” sendiri. Orang Minangkabau saat ingin berbicara tentang dirinya dan Islam harus meminjam lidah orang Leiden, seorang *bundo kanduang* yang ingin bicara posisi perempuan dalam kebudayaan Minangkabau di jurnal internasional suka tidak suka harus meminjam lidah Jeffrey Hardley.

Maka untuk mengatasi hubungan timpang antara “barat” dan “timur” ini, yang dalam terminologi teknis disebut hubungan subjek dan liyan (*the other*) bukanlah dengan menandingi, melainkan bernegosiasi. Jika menandingi, syarat utama yang harus dipenuhi

adalah pengakuan aturan main. Jika seorang petinju yang pernah kalah oleh petinju lain ingin membalas kekalahannya, maka pembalasan itu mau tak mau juga berlangsung dalam pertandingan tinju dengan aturan yang sama dengan pertandingan sebelumnya. Di sini tidak terjadi masalah, sebab aturan itu sama-sama diakui dan disepakati. Namun dalam hal hubungan “barat” dan “timur”, aturan itu telah ditetapkan sepihak sebelumnya oleh “barat”. Aturan itulah yang disebut wacana akademis modern ---wacana dalam pengertian Foucauldian. Contoh sederhana adalah aturan tentang catatan kaki atau *statement of problem* yang harus tercantum dalam sebuah karya ilmiah. Sementara dalam tradisi keilmuan Islam, misalnya logika (*mantiq*), pengarang kitab *mantiq* tidak pernah membuat bab pendahuluan yang berisi memuat *statement of problem* yang akan dibahas dalam kitabnya. Dia justru membuka kitabnya dengan doa dan puja-puji kepada Tuhan dan Nabi Muhammad.

Negosiasi dalam hubungan subjek dan liyan dalam konteks pascakolonial adalah negosiasi atas posisi dalam konstelasi jejaring struktural kekuasaan, entah itu kuasa pengetahuan, ekonomi, budaya maupun politik. Negosiasi ini bisa berlangsung jika pertama dan utama sekali posisi subjek ---dalam hal ini civitas akademika pascasarjana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol --- mengenali dan menyadari posisinya dalam relasi dengan liyan. Kalau posisi ini tidak disadari, bahkan tidak dikenali, maka yang akan terjadi adalah civitas akademika jadi bulan-bulanan gagasan yang diimpor dari pihak liyan, entah itu dari “barat” atau dari “timur” yang lain. Mereka jadi beo peniru dan bebek pengikut. Orang di “barat” mempercakapkan ekologi kerusakan hutan, dia pun ikut ngomong itu tanpa menyadari posisinya sebagai orang yang bersekolah di kawasan pantai yang tak punya hutan. Ketika di sana orang bicara tentang ekonomi kreatif untuk masyarakat urban, dia ikut juga ngomong itu, tanpa menyadari masyarakat tempat dia belajar hidup dari ekonomi pertanian. Ketika orang di belahan dunia

lain memanjangkan jenggot, dia pun ikut mencari minyak *firdaus* pemancing jenggot yang tak bisa subur di dagu pria ras Melayu.

Sepintas lalu cara berpikir pascakolonial memang bernada skeptis dan bahkan sinis. Namun hanya dengan cara inilah kiranya upaya pengambilan jarak dari hiruk pikuk wacana bisa dilakukan demi mengenali dan menyadari posisi subjek tempat civitas akademika pascasarjana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol berada.

Kalau tidak dengan cara ini, maka output yang akan membuat program pascasarjana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol unggul hanya omong kosong belaka. Output itu adalah pemikiran Keislaman Nusantara. Bagaimana mungkin menghasilkan produk seperti ini jika yang dipakai adalah kerangka dan rancang bangun dari pihak lain yang bukan Nusantara, walaupun bahan-bahan bangunannya memang berasal dari Nusantara. Pernyataan ini sekaligus ingin menegaskan bahwa Keilmuan Nusantara yang ingin dikembangkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol bukanlah keilmuan *tentang* Islam Nusantara, dalam arti bahwa fenomena Islam dan keislaman yang ada di Nusantara diteliti dan diformulasi berdasarkan kacamata teoretis tertentu hasil jiplakan dari pihak lain. Keilmuan Islam Nusantara adalah keilmuan hasil dialektika antara perspektif dan tilikan teoretis khas Nusantara dengan yang berasal dari liyan. Dialektika ini berlangsung ketika kedua perspektif itu bertentangan. Keilmuan Islam Nusantara adalah produk dari upaya perimbangan atas pertentangan itu sendiri.

Kerangka berpikir pengembangan program pascasarjana sebagai unggulan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sekaligus juga menjelaskan mengapa Keilmuan Nusantara itu pertama-tama dikembangkan di tingkat pascasarjana, karena di program inilah akan digodok sosok-sosok yang akan turun mengajar di tingkat sarjana. Program pascasarjana akan mempersiapkan tenaga yang akan membimbing proses pendewasaan Keilmuan Islam Nusantara

di tingkat sarjana. Pematangan Keilmuan Islam Nusantara tidak bisa langsung dilakukan di tingkat sarjana karena perangkat-perangkat dasar untuk itu belum tersedia secara holistik dan menyeluruh.

GAMBAR 2.19. HEKSAGONAL KEILMUAN PASCASARJANA



2.7. RANCANGAN PROGRAM STUDI ILMU UMUM

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, cara berpikir untuk mendudukan masalah keunggulan apa yang ditawarkan program keilmuan umum pada dasarnya sama dengan yang berlaku dengan program ilmu keagamaan. Hanya saja di sini persoalannya relatif lebih jelas karena yang jadi masalah hanya bagaimana akal supaya produk keilmuan umum bisa terpilih untuk dipakai di dunia professional. Satu-satunya langkah untuk mengatasi persoalan ini adalah membuktikan diri unggul dan berkualitas sehingga layak dipilih. Di wilayah ilmu keagamaan masalahnya jauh lebih berat karena di situ terjadi kemiskinan dan ketidakpercayaan diri, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan sedemikian rupa untuk mewujudkan kepercayaan diri program ilmu keagamaan.

Di wilayah keilmuan umum yang jadi soal bukan lagi kepercayaan diri, sebab masyarakat luas sudah secara *taken for granted* berpikir berdasarkan profesionalisme: persoalan bangunan

akan ditanyakan pada orang yang menguasai ilmu teknik sipil, persoalan penyakit dan obatnya ditanyakan kepada orang yang belajar ilmu kesehatan, soal pengelolaan kota atau regulasi politik, akan diserahkan kepada orang yang belajar kebijakan publik dan ilmu politik. Maka persoalan yang harus dipikirkan di wilayah keilmuan umum ketika harus bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi umum lain adalah soal kreativitas. Kalau kreativitas ini sudah terselesaikan dengan baik, maka soal inovasi dan produktivitas akan terselesaikan dengan sendirinya. **Hanya orang kreatif yang bisa berinovasi dan oleh karena itu produktif.**

Daya kreatif bisa terasah jika seseorang memiliki kepekaan terhadap sekitar. Alam terkembang jadi guru adalah prinsip dasar dari daya kreativitas. Jika alam yang terkembang itu tidak dijadikan guru, melainkan dijadikan objek pasif tanpa didialektikakan dengan posisi subjek, yang akan lahir bukanlah kreativitas, melainkan eksploitasi dan dominasi.

Di titik inilah pembicaraan tentang sumber daya menjadi relevan, karena alam terkembang yang akan dijadikan guru dalam mengasah kreativitas civitas akademika program keilmuan umum tak lain tak bukan adalah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di sekitar.

Mengingat Sumatera Barat yang mayoritas beretnis Minangkabau tempat Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol berada tidak terlalu kaya sumber daya alam di banding wilayah-wilayah lain di Nusantara, maka alam yang dijadikan guru oleh disiplin ilmu umum itu dipandang secara sektoral. Artinya, tidak masuk akal jadinya jika Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol bersigegas membuka program studi atau jurusan pertambangan atau teknologi perkebunan sebab alam Sumatera Barat tidak banyak menyediakan hal tersebut.

Adapun sektor yang akan dijadikan wilayah eksplorasi keilmuan umum sehingga dia memiliki keunggulan yang kontekstual ada enam: sektor sosial kemasyarakatan, sosial politik, budaya dan kesenian, ekonomi, teknologi dan kejiwaan. Sektor-sektor ini adalah enam di antara sekian banyak sektor sumber daya alam dan manusia yang paling mungkin diolah terlebih dahulu oleh keilmuan umum Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol. Dalam perkembangan selanjutnya tentulah sumber daya tersebut akan berkembang dan menuntut pengembangan lebih jauh keilmuan umum itu sendiri.

2.7.1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sektor sosial kemasyarakatan, politik, budaya dan kesenian adalah sektor yang wilayah keilmuannya tumpang tindih dengan program ilmu keagamaan. Tantangan terbesar dalam menyatakan program ini sebagai salah satu program unggulan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol terletak pada jantung persoalan hubungan agama dan ilmu. Keberhasilan atau kegagalan rencana dan pelaksanaan proses penyatuan keduanya akan terlihat langsung dalam bagaimana program ilmu sosial dan ilmu politik ini dihubungkan dengan program ilmu keagamaan.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol menyiasati agar hubungan keduanya jadi dialektis, bukan dominatif, dengan cara memosisikan keduanya pada tempat masing-masing. Program Ilmu sosial dan ilmu politik berada pada posisi yang kuat secara metodologis, sementara program ilmu keagamaan berada pada posisi yang kuat secara kerangka filosofis dan kritik. Program Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dapat mendialogkan keketatan dan keakuratan metodologis keilmuannya dengan program ilmu keagamaan. Sebaliknya, program ilmu keagamaan dapat mendialogkan asumsi-asumsi filosofis dan kritisnya kepada ilmu sosial dan ilmu politik.

Dengan cara ini, ilmu sosial dan politik akan berjalan dengan pola dan langkah-langkah keilmuannya sendiri yang telah mapan. Tidak perlu kiranya disiplin-disiplin yang dinaungi oleh program ini ditambahi atribut “islami” di belakangnya, sebab wilayah yang dirambahnya tidak hanya terdiri dari unsur “islami”, melainkan juga unsur budaya lokal dan ilmu dan teknologi modern. Dengan kata lain, paradigma keilmuan ilmu sosial dan politik akan dibiarkan sesuai dengan perkembangan alamiahnya sendiri. Jika di internal keilmuan ilmu sosial dan politik sudah terjadi pergeseran paradigma dari modern ke posmodern, dari positivistik-objektif ke relativisme-intersubjektif, maka tidak perlu misalnya program ilmu keagamaan mendorong-mendorongnya untuk meragukan atau mengkritik paradigma modern. Di internalnya sendiri sudah terjadi krisis akibat upaya kritik-diri yang selalu dilakukan atas dasar etos ilmiah.

2.7.2. Ekonomi dan Bisnis

Sektor kehidupan masyarakat yang paling signifikan dibicarakan dalam upaya alih status IAIN Imam Bonjol ke Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah sektor ekonomi. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak akan munafik bahwa kehidupan di era kontemporer sekarang ditentukan oleh perhitungan ekonomis untung-rugi. Bahkan seorang ilmuwan, dosen, penceramah, pejabat, budayawan, motivator dan lain sebagainya yang menceramahkan bahwa manusia memang butuh makan untuk hidup, namun hidup bukan hanya untuk makan pun tidak akan lepas dari relasi ekonomi. Harus diragukan dan ditanggapi secara skeptis apakah orang-orang ini akan ikhlas dan bersabar saja jika orang yang mengundangnya untuk menceramahkan pernyataan itu tidak memberi imbalan? Namun ini bukan berarti Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol berpaham determinisme ekonomi dengan menganggap realitas ditentukan oleh soal ekonomi.

Pernyataan di atas adalah bukti bahwa Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol selalu berpikir dialektis, dan dalam persoalan ekonomi ini, dialektika yang dilakukan adalah keinginan idealistis dengan kebutuhan realistik. Jika memang realitas memperlihatkan bahwa orang harus berkompetisi dalam memenuhi kebutuhannya secara ekonomis, sebab kebutuhan inilah yang menentukan kelancaran sektor-sektor lain dari kehidupan individu maupun masyarakat, maka program ekonomi dan bisnis harus dirancang memang untuk memajukan keterampilan orang dalam kehidupan ekonomi. Pendek kata, membuat orang pintar dalam mencari nafkah.

Oleh karena itulah logika yang dipakai untuk mengembangkan program ini juga logika ekonomi: logika peluang. Di antara peluang secara ekonomi yang disediakan alam ranah Minang, Sumatera Barat, adalah sektor pertanian, jasa dan perdagangan. Dalam menghadapi ketiga sektor ini, program ilmu ekonomi dituntut untuk menyediakan ilmu dan keterampilan yang bisa memperhitungkan keuntungan dan kerugian.

Dengan cara berpikir seperti ini, program Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol akan menawarkan unggulan dari segi ilmu manajemen, sebab ilmu inilah yang diperlukan oleh siapa pun dalam soal mencari nafkah. Bukankah manajemen itu cara berpikirnya adalah bagaimana modal yang sedikit mendatangkan untung yang banyak? Di sektor pertanian, yang terutama diperlukan adalah manajemen produksi, di wilayah jasa yang diperlukan adalah manajemen komunikasi, dan di wilayah perdagangan yang diperlukan adalah manajemen pemasaran. Untuk pembidangan dan penjurusan yang lain, tinggal meneruskan logika ini saja. Apakah itu jurusan akuntansi, ilmu ekonomi murni dan lain sebagainya, semuanya harus terpulang pada logika tersebut.

Rencana seperti ini bukan berarti membangun suatu program yang tujuannya semata-mata mencari keuntungan secara membabi buta. Program ini dirancang bukan pula untuk sedari dini sudah diawasi rumpun ilmu lain, dalam hal ini keilmuan agama. Proses “pengawasan” itu sudah jelas telah dilakukan di dalam internal keilmuan ekonomi itu sendiri dan dengan caranya sendiri. Tugas keilmuan lain adalah berdialog seputar asumsi-asumsi dari rumpun keilmuan ekonomi. Dari proses dialog inilah akan terjadi proses kritik diri dan revisi pandangan. Artinya, program ini dibiarkan terbangun secara alamiah tanpa sedari awal diberi satpam moral untuk mengawasi dan menguntitnya.

Karena masyarakat tempat Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memiliki sumber daya alam yang tidak terlalu kaya. Oleh karena itu yang jadi kekayaan terbesar masyarakat adalah kreativitas dan keuletan. Kekayaan ini harus dikelola dengan keilmuan yang kuat sekaligus relevan. Wujudnya adalah ekonomi kreatif.

2.7.3. Sains dan Teknologi

Banyak pihak, terutama dari kalangan Islam, berlomba-lomba membangun lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang sains dan teknologi. Perlombaan ini terjadi dalam rangka mengejar ketertinggalan di perlombaan lain, yakni perlombaan dengan kemajuan sains dan teknologi masyarakat non-muslim. Dengan kata lain, perlombaan mendirikan fakultas sains dan teknologi di perguruan tinggi Islam adalah perlombaan dalam perlombaan.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak ingin terjebak pada perlombaan yang tidak perlu ini, sebab harus diakui dengan jujur dan ikhlas bahwa ketertinggalan masyarakat Islam dalam hal sains dan teknologi adalah fakta. Jika sesama umat Islam berlomba mendirikan lembaga sains dan teknologi, perlombaan itu dari segi memulai. Sementara masyarakat dan kebudayaan non-muslim yang

sudah lebih dahulu memulai sibuk berlomba mengembangkan. Walhasil, selamanya umat Islam akan tertinggal. Jika dilihat dari sisi teknologi *an sich*, tidak ada persoalan dengan keteringgalan itu, sebab selama orang Islam nyaman dan aman membaca al-Quran lewat layar ponsel buatan China, naik haji dengan pesawat buatan Prancis, atau mengawetkan daging kurban dengan teknologi dari Jepang. Oleh karena itu cara pandang tentang sains dan teknologi ini harus diarahkan kepada kebutuhan masyarakat yang terdekat dengan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol, bukan pada soal bagaimana mengejar keteringgalan dari masyarakat dan kebudayaan lain yang kebetulan non-Muslim.

Sebagaimana yang disinggung di bagian ekonomi dan bisnis tadi, masyarakat tempat Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memiliki sumber daya alam yang tidak terlalu kaya. Fakta ini bisa dijadikan modal besar jika diolah dengan ilmu yang relevan, yakni ekonomi kreatif. Untuk menopang kegiatan ekonomi kreatif inilah sesungguhnya program keilmuan sains dan teknologi didirikan.

Yang akan dilakukan oleh program keilmuan sains dan teknologi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah, misalnya, mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk membasmi hama, bukan untuk belajar untuk ikut lomba membikin robot yang bisa main bola. Yang akan dilakukan adalah menerjemahkan manajemen pemasaran yang baik dan manusiawi ke dalam teknologi informasi-komunikasi yang efisien-efektif dan manusiawi. Yang akan dikembangkan adalah teknologi yang mampu menunjang kebutuhan keilmuan lain agar bisa berjalan dengan tabiat alamiahnya masing-masing.

2.7.4. Psikologi

Untuk program keilmuan selanjutnya yang akan dikembangkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah ilmu psikologi.

Program keilmuan ini didirikan bukan dengan asumsi dasar bahwa ahli-ahli psikologi dan psikoterapi profesional di zaman sekarang makin dibutuhkan pasar tenaga kerja, karena tuntutan pasar tenaga kerja yang makin meningkat akibat banyaknya orang yang stress. Kalau cara berpikir ini yang dipakai, maka pendirian program ini tak ubahnya dengan mendirikan lembaga pendidikan dukun untuk mengobati orang kesurupan di zaman dulu. Program keilmuan psikologi didirikan bukan untuk mencetak dukun pengusir stres yang dialami oleh manusia modern. Program keilmuan ini didirikan juga bukan untuk mencetak sipir kejiwaan, yakni ahli-ahli yang punya teknik dan keterampilan tertentu untuk membuat manusia lain taat dan patuh pada perintah, apakah atasan bagi para pekerja dan pegawai, maupun siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan.

Dia didirikan untuk menyediakan perspektif yang relevan dengan kehidupan manusia modern yang didera oleh tekanan administrasi dan birokrasi di segenap aspek kehidupan, bahkan yang paling relevan dengan masyarakat Sumatera Barat adalah pengaruh urbanisasi pada kejiwaan masyarakat saat pusat keramaian makin bertumpuk di kota. Seorang psikolog harus memiliki perspektif keilmuan yang sesuai dengan bidangnya untuk menjelaskan perasaan sayang dan mengayomi seorang guru atau dosen yang lebih sering memberi perintah administratif-birokratis secara online kepada murid atau mahasiswanya. Begitu pula sebaliknya, adalah tugas ilmu psikologi menjelaskan pengertian hormat dan takzim pada guru dalam diri murid atau mahasiswa yang cuma mengenal guru dan dosennya lewat profil sosial-media mereka.

2.8. HUBUNGAN INTERAKTIF-DIALEKTIS KEILMUAN AGAMA DAN KEILMUAN UMUM

Dari pemaparan tentang program unggulan yang ditawarkan Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol, di bagian ini akan

dinyatakan bagaimana cara Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memandang hubungan keduanya berdasarkan Paradigma Keilmuan Islam Nusantara.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak memosisikan rumpun keilmuan agama sebagai polisi moral maupun pawang prilaku yang akan mengendalikan ilmu umum saat dia dirasa melenceng dari moralitas dan etika yang ditetapkan secara normatif dan sepihak dalam doktrin-doktrin tekstual keagamaan. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol juga tidak memosisikan rumpun keilmuan agama secara instrumental sebagai mesin cuci atau *vaccum cleaner*. Adalah keliru dan berdosa besar jika ajaran Islam yang begitu agung direduksi berdasarkan nalar teknis menjadi semacam mesin cuci atas kesalahan-kesalahan yang secara realistis akan selalu terjadi dan diulangi. Manusia yang di kehidupan profesionalnya terbelit oleh struktur yang memaksanya mengeksploitasi orang lain tidak bisa datang ke seorang yang belajar tasawuf, akhlak, hukum Islam atau keilmuan Islam lain untuk meminta petunjuk agar dia bisa bersih lagi. Moralitas dan etika harus ditumbuhkembangkan di mana saja dan kapan saja, dan itu tugas seorang manusia lewat hati-nuraninya.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak berpikir bahwa dengan mengintegrasikan ilmu agama dan umum, maka dengan sendirinya ilmu umum ini akan berisi nilai-nilai moral dan etis yang islami. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak akan serampangan mengandaikan bahwa kalau fakultas umum sudah ditambahi kata Islam, maka keilmuan agama akan membersihkan sisi-sisi “negatif” dalam fakultas ilmu umum itu.

Tugas keilmuan agama adalah mendalami Islam dan keislaman supaya bisa membuahkkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan, baik itu sebagai warga budaya, warga negara, maupun warga dunia. Bermanfaat di sini berarti **inspirasi nilai-nilai**, bukan penentu nilai-nilai. Jika posisinya diubah menjadi

pawang perilaku, yang terjadi adalah pembatasan. Jika demikian, rumpun keilmuan umum sudah dibuat layu sebelum berkembang. Bagaimana mungkin bisa mengembangkan diri dan mengejar kemajuan orang lain, jika baru lahir saja sudah dibatasi, sudah dihardik-hardik dengan petuah moral hasil tafsiran atas agama.

Dengan kata lain, harus dibedakan dengan tegas antara agama dengan ilmu agama, antara Islam dengan ilmu agama Islam sebagaimana yang telah dipelajari dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak awal sejarah Islam. Cara pikir bahwa jika ilmu agama Islam dicangkokkan ke dalam ilmu umum niscaya akan mengubah arah dan tabiat ilmu umum yang saat ini disinyalir sudah memberi mudharat kepada manusia gara-gara dia lahir dari alam pikiran modern yang memusatkan manusia di tengah konstelasi kosmos adalah tidak benar, sebab ilmu agama itu sendiri pada hakikatnya adalah salah satu jenis dari ilmu (*science*). Cara pikir ini keliru, sebab mengidentikkan fungsi agama sebagai inspirasi atau mata air nilai bagi manusia dalam menjalani hidup sebagai manusia dengan ilmu agama yang memosisikan agama dan keagamaan sebagai objek kajiannya.

2.9. RANCANGAN FAKULTAS UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL

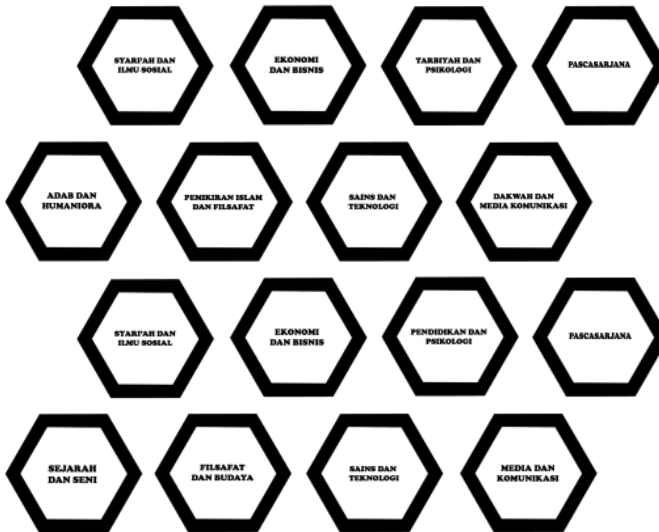
Bagaimana Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol merancang fakultas-fakultasnya? Caranya adalah berangkat dari prinsip dasar perimbangan dalam pertentangan. Civitas akademika Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol sudah mengakui bahwa terjadi pertentangan antara keilmuan agama Islam dengan keilmuan umum. Pertentangan ini tidak dapat ditanggulangi kecuali dengan cara mencari perimbangan antara keduanya, sebab jika dipaksakan untuk lebur jadi satu, maka salah satu dari keduanya akan kalah atau dikalahkan.

Dalam konteks ilmu pengetahuan, keseimbangan antara keduanya terutama akan terwujud jelas pada level epistemologis dan metodologis, karena di dua wilayah inilah interaksi akan terasa sekali. Kemajuan metodologis yang sejauh ini telah dicapai keilmuan umum dapat dimanfaatkan keilmuan agama untuk melahirkan *insights* (wawasan) teoretis baru, sementara keilmuan agama dapat menyediakan tradisi gagasan yang sangat kaya untuk melengkapi asumsi-asumsi dasar keilmuan umum. Pola perimbangan dalam pertentangan ini sesungguhnya tidak akan meletupkan konflik antarklaim kebenaran, karena didasarkan pada prinsip fungsional khas kebudayaan masyarakat Minangkabau di mana yang buta peniup debu di lesung, yang lumpuh penghuni rumah, yang tuli pelepas bedil, yang cerdas teman diskusi [*nan buto paambuih lasuang; nan lumpuah pahuni rumah;; nan pakak palapeh badia; nan cadaiak lawan baiyo*]. Kalau salah satu dari orang-orang berkekurangan ini merasa lebih dari yang lain, maka kerja menumbuk padi di lesung itu tidak akan membuahkan hasil, yakni menghasilkan beras. Hal yang sama lebih kurang juga berlaku di kegiatan akademik (*academic enterprise*) yang tujuannya adalah menumbuk buah-buah pengalaman dan perenungan sehingga menghasilkan beras bernama pengetahuan tentang kebenaran.

Berdasarkan cara berpikir di atas Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol merancang fakultas-fakultas sebagai berikut:

- 1.9.1. Fakultas Syariah dan Ilmu Sosial
- 1.9.2. Fakultas Filsafat dan Budaya/ Pemikiran Islam dan Filsafat
- 1.9.3. Fakultas Sejarah dan Seni Fakultas/ Adab dan Humaniora
- 1.9.4. Fakultas Pendidikan dan Psikologi/ Fakultas Tarbiyah dan Psikologi
- 1.9.5. Fakultas Media dan Komunikasi/ Dakwah dan Media Komunikasi
- 1.9.6. Fakultas Sains dan Teknologi
- 1.9.7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

GAMBAR 2.20. NAMA-NAMA FAKULTAS UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA IMAM BONJOL



Kerangka dasar dari pembentukan fakultas-fakultas di atas –selain Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis-- adalah sebagaimana yang disampaikan sebelumnya (lihat tabel Penjelasan Heksagonal Unggulan Studi Keagamaan). Di sini Islam diposisikan sebagai gugus keilmuan tertentu yang akan berdialektika dengan gugus keilmuan lain yang dipandang dekat. Dengan kata lain, Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak memandang ada filsafat, humaniora, pendidikan, komunikasi atau apa pun yang asli produk Islam. Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol memosisikan apa yang dikatakan sebagai filsafat, humaniora, pendidikan, komunikasi, atau apa pun yang selama ini disebut-sebut sebagai “yang islami” adalah hasil konstruksi historis persis sebagaimana keilmuan umum yang tidak disifati “islami” adalah juga konstruksi historis.

Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol tidak ingin berpikir esensialis ketika menghadapi identitas sesuatu yang sesungguhnya adalah hasil konstruksi historis. Upaya Universitas Islam Nusantara

Imam Bonjol dalam mendialektikkan Islam dengan keilmuan-keilmuan umum adalah upaya rekonstruksi ulang identitas keilmuan yang selama ini bertentangan demi menghasilkan identitas baru yang kelak dapat dinamai Keilmuan Islam Nusantara.

Ada pun Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah fakultas keilmuan umum yang didirikan tersendiri dengan tidak melebur program-program studinya ke dalam fakultas keagamaan yang telah ada selama ini untuk menegaskan tabiat dan orientasi keilmuan yang ada di kedua fakultas ini. Bagaimana pun juga orientasi keilmuan di kedua fakultas ini adalah praktik. Dimensi praktik keilmuan di kedua fakultas ini adalah wajah Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol yang akan langsung dipandang masyarakat, dengan asumsi masyarakat selalu lebih cepat menangkap sisi praktis keilmuan ketimbang sisi analitis dan reflektifnya.

Kedua fakultas ini didirikan dengan latar belakang dan tujuan-tujuan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat di zaman sekarang memerlukan keterampilan manajerial ekonomi yang mumpuni untuk bertahan, dan hal itu hanya bisa dijalankan jika ditopang dengan penguasaan sains terapan serta teknologi yang tepat guna dan relevan, bukan teknologi yang semata-mata termutakhir. Demikian.....

BAB III

PENUTUP

Demikianlah...

*Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi;
pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan
bagi orang-orang yang berfikir...*

Nasakah adalah sebuah ikhtiar. Ikhtiar adalah langkah konkret pertama dalam mewujudkan cita-cita yang digantungkan setinggi langit. Langkah konkret kedua adalah merendahkan hati ke bumi melebihi kening yang tengah sujud. Di antara kedua langkah itu dan langkah-langkah selanjutnya dipasang doa. Dengan begitulah terwujud keseimbangan antara dua hal bertentangan: usaha zahir dan gerak batin.

Dalam menyusun proposal Alih Status IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akan kondisi pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia yang didesak tuntutan dari berbagai pihak. Di satu sisi, perguruan tinggi Islam dituntut untuk selalu mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam; di sisi lain dia diminta pula merespon perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat; di sisi lainnya lagi, dia dipaksa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lain; di sisi lain satunya lagi, dia diminta untuk selalu mempertahankan sifat dasar lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai pedagogi paling dasar ---memberikan bimbingan pada seorang anak manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan---; dan di sisi lain selain dari itu semua,

dia bahkan dituntut sebagai benteng dan pawang moral di tengah kondisi yang ditengarai mengalami degradasi moral akibat berbagai perubahan dan perkembangan yang berlangsung.

Berdasarkan semua latar belakang kegelisahan ini, Naskah Akademik Alih Status IAIN Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol dibuat dengan sebuah cita-cita besar, yakni mewujudkan Keilmuan Islam Nusantara yang merengkuh tiga arus besar tradisi yang bermuara ke tengah kehidupan masyarakat: kebudayaan lokal, agama Islam, dan ilmu pengetahuan modern.

Cita-cita yang ada di balik proposal ini adalah untuk membangun suatu universitas yang memang memperlakukan seluruh arus tradisi itu secara adil, tanpa ada satu pihak yang dijadikan subjek pelaku dan pihak lain sebagai objek penderita. Harus diakui oleh naskah akademik ini bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan kerja keras, dan itu sangat logis sebab keinginan yang akan direngkuh tergantung setinggi langit.

Berhenti pada pengakuan ini saja tentu tidak akan berarti apa-apa jika tidak langsung diwujudkan dalam kerja yang konkret dan terarah. Maka uraian yang termaktub di dalam naskah akademik ini adalah wujud kerja konkret tersebut. Di dalam naskah akademik ini diuraikan panjang lebar landasan dan pertimbangan berpikir yang dipakai untuk membangun Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol yang bercita-cita mengembangkan keilmuan Islam Nusantara. Arah yang akan dituju didasarkan pada landasan dan pertimbangan itu. Di dalamnya pula sudah diuraikan apa saja modal dan kekuatan yang sejauh ini sudah dimiliki dan dikuasai. Telah pula diungkapkan dengan jujur apa saja yang jadi kekurangan dan kelemahan yang harus ditambah dan diperkuat dalam rangka mewujudkan cita-cita itu.

Dari landasan dan pertimbangan berpikir yang telah diuraikan itu, maka dengan menyebut nama Tuhan yang telah mewahyukan

kepada lebah untuk membangun rumah-rumah di atas bukit, menghisap sari mawar dan mengalirkan madu, optimisme IAIN Imam Bonjol untuk beralih status menjadi Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol adalah bentuk kepercayaan diri yang bermartabat sekaligus kerendahatian yang ikhlas untuk mengabdikan pada pengetahuan dan kebenaran yang telah diciptakan Tuhan yang Mahatahu dan Mahabener.

Bismillahirrahmanirrahim...

Titah Sati

*Dan telah dititahkan kepada Universitas Islam Nusantara Imam Bonjol;
Kembangkanlah Islam Nusantara di fakultas-fakultas;
di program studi-program studi; dan di tempat-tempat yang lain*

*Kemudian berinteraksi dan berdialoglah dengan
Sesama; dengan Alam dan dengan Tuhan
agar hidupmu memiliki kekuatan etis dan etos*

*Dari keberimbangan-keberdaulatan itulah lahir manusia yang
beriman berbudaya; berilmu bermartabat; berjatiidiri bermoral
serta manusia yang ahli-rendah hati; teguh-jujur; ulet-bermanfaat
Sesungguhnya yang demikian adalah tanda orang-orang cerdas cendekia*

[TS, 6:6-6]

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin., *Islamic Studies Diperguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Abdullah, Taufik, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, New York: Cornell University Press, 1966.
- Bagir, Zainal Abidin dan Irwan Abdullah, "The Development and Role of Religious Studies: Some Indonesian Reflection," dalam Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dan Patrick Jory (eds) , *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporer Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011
- Barbour, Ian G. "Ways of Relating Science and Theology," dalam R. J. Russel , *et al.*, (eds.) *Physics, Philosophy and Theology: A Common Quest for Understanding*, Vatican: Vatican Observatory, 1988
- Bateman, Terence. "The Science-Religion Discourse: Models of Relation Beyond Barbour," dalam *Omega: Indian Journal of Science and Religion*, Jan 1, 2008.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman dan Patrick Jory (eds) , *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporer Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011
- Darsono, Hafidz Bimo, "Laba-laba yang Mati dalam Sarangnya," dalam Indah Fajar Rosalina, *UIN SUKA Aksi, UIN SUKA Diskusi*, Yogyakarta: Arena Press, 2014

- Edes, Taner *An Illusion of Harmony: Science and Religion in Islam*, New York: Prometheus Books, 2007
- Emmel, Barbara A., “Common Ground and (Re)Defanging the Antagonistic: A Paradigm for argumentation as shared inquiry and responsibility”, dalam Edda Weigand (eds.) *Dialog and Rhetorics*, Amsterdam: Johnson Benjamin, BV., 2008
- Fiorenza, Francis Shussler, *Foundational Theology: Jesus and Church*, (New York: Crossroad, 1984, hlm. 302).
- Iqbal, Muzaffar, *Science and Islam*, Connecticut: Greenwood Press, 2007
- Morrow, Raymond A. dan Carlos Alberto Torres, “The State, Globalization and Educational Policy,” dalam Nicholas C. Burbules dan Carlos Alberto Torres, *Globalization and Education: Critical Perspectives*, London: Routledge, 2000.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1959.
- Said, Edward, *Orientalism*, New York: Vintage Books, 1979.
- Sastrapratedja, M., S.J. *Pendidikan sebagai Humanisasi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2001.
- Shalihin, Nurus, *Demokrasi Lokal di Bawah Bayang-bayang Negara: Studi atas Dominasi dan Hegemoni terhadap Nagari di Minangkabau*, Tesis Master, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.
- Stenmark, Michael., *How to Relate Science and Religion*.
- Van Huessteen, *The Shaping of Rationality*
- Weigand, Edda (eds.) *Dialog and Rhetorics*, Amsterdam: Johnson Benjamin, BV., 2008